Rakyat Bengkulu

LAPORAN INVESTIGASI SURATKABAR TERBAIK IPMA 2020

RABU, 30 DESEMBER | TAHUN 2020 — Pilihan Utama — TERBIT 16

Saya dari lembaga setelah tahun baru (2021) akan turun lapangan. Setiap orang atau kelompok yang punya usaha, harus sesuai dengan regulasi yang ada

Barli Halim, SE
Ketua DPRD BS

Polisi Panggil PT BSL

Apresiasi Investigasi RB, Ketua Dewan Turun ke Sungai Mertam

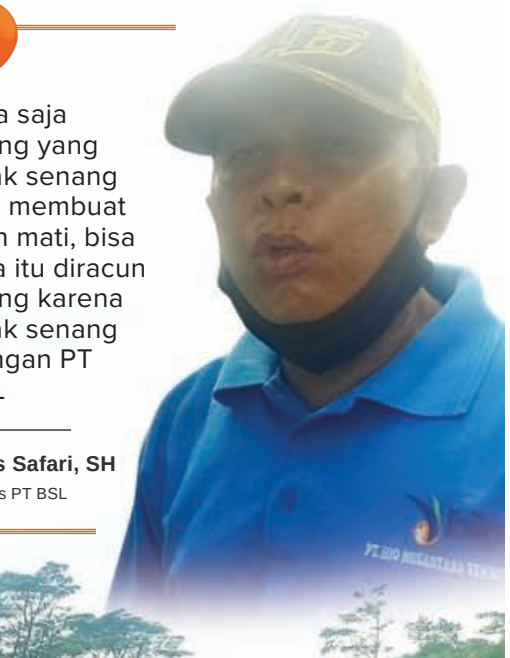

Bisa saja orang yang tidak senang lalu membuat ikan mati, bisa saja itu diracun orang karena tidak senang dengan PT BSL

Idius Safari, SH
Humas PT BSL

KOTA MANNA - Unit Tipidter Polres Bengkulu Selatan (BS) dalam waktu dekat memanggil pihak PT.Bengkulu Sawit Lestari (BSL) yang beralamat di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten BS. Pemanggilan ini terkait masalah limbah di Sungai Mertam.

Baca **POLISI...Hal 7**

RIO/RB

BEROPERASI: Aktivitas masuknya sawit PT.Bengkulu Sawit Lestari (BSL) di Desa Suka Jaya Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan.

Disiapkan Rp 110 Triliun

Jokowi Ingatkan Jangan Ada Potongan

JAKARTA – Tahun depan pemerintah menyiapkan anggaran Rp 110 triliun untuk beragam jenis bansos. "Jangan sampai ada potongan-potongan apapun. Seperti kejadian di Bansos Jabodetabek," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di penutup pengantar rapat terbatas (ratas) persiapan penyaluran bantuan sosial (bansos) 2021 di Jakarta kemarin (29/12).

Baca **JOKOWI...Hal 7**

IST/RB

TUMBUH & TANGGUH: Direktur Utama Bank Bengkulu Agusalim, Komisaris Utama Independen Ridwan Nurazi dan jajaran pasca penandatanganan kerjasama dengan Direktur Utama PT. Mega Corpora Ardhayadi, Senin (28/12).

Teken Kerjasama dengan Mega Corpora

Modal Inti Bank Bengkulu Lebih Rp 1 Triliun

BENGKULU – Langkah Bank Bengkulu menjadi Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) II berjalan mulus. Senin (28/12), PT. Mega Corpora secara resmi telah menandatangani perjanjian pengikatan pengambilan saham Bank Bengkulu.

Setelah penandatanganan yang berlangsung di Menara Mega Jl. Kapten Tendean Kav. 12-14A, Mampang Jakarta Selatan itu, Mega Corpora akan melaksanakan penyetoran dana setoran modal untuk Bank Bengkulu sebesar Rp 100 miliar untuk tahap pertama.

Penandatanganan perjanjian pengikatan pengambilan saham Bank Bengkulu itu dilakukan di hadapan notaris Dharma Akhyuzi. Perjanjian dilakukan antara Direktur Utama Bank Bengkulu Bapak H. Agusalim, SE, ME dan Direktur Utama PT. Mega Corpora Ardhayadi. Hadir pula dalam penandatanganan tersebut Komisaris Utama Independen Bank Bengkulu Prof. Dr. Ridwan Nurazi, SE,. M.Sc.

"Dengan penyetoran dana setoran modal tersebut, Alhamdulillah modal Bank Bengkulu telah mencapai Rp 1 triliun lebih. Berdasarkan hal tersebut, proses akan menunggu verifikasi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk dapat mengukuhkan Bank Bengkulu menjadi Bank BUKU II," kata Direktur Utama Bank Bengkulu H. Agusalim, kemarin (29/12).

Baca **MODAL...Hal 7**

JPG/RB

TERSANGKA: Artis Gisella Anastasia bersiap menjalani pemeriksaan di Gedung Ditkrimsus Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (23/12) lalu. Artis Gisella Anastasia menjalani pemeriksaan tambahan sebagai saksi selama 4,5 jam atas video asusila yang mirip dirinya.

Gisel Terancam Belasan Tahun Penjara

JAKARTA - Kasus video panas berdurasi 19 detik yang menyeret artis Gisella Anastasia memasuki babak baru. Pihak kepolisian telah menetapkan mantan istri Gading Marten tersebut sebagai tersangka.

Selain Gisel, juga teman laki-lakinya berinisial MYD ada di dalam video syur itu. MYD diduga merupakan Michael Yukinobu Defretes. Kasubdit TindakPidanaSiber Ditreskrimsus PoldaMetro Jaya AKBP Dhany membenarkan bahwa MYD merupakan Michael. Yang pasti, keduanya telah mengakui bahwa pemeran yang ada di dalam video syur tersebut adalah mereka. Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat konferensi pers di kantornya, kemarin (29/12).

Baca **GISEL...Hal 7**

KPU Provinsi Tunggu Instruksi MK

BENGKULU - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu siap menghadapi gugatan dengan nomor 79. PAN.MK/AP3/12/2020 yang diajukan oleh pasangan calon gubernur, Agusrin-Imron terkait hasil Pilgub ke Mahkamah Konstitusi (MK). Komisioner KPU Provinsi Bengkulu Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Bengkulu, Eko Sugianto SP, MM menyampaikan pihaknya saat ini masih menunggu kepastian teregister.

Baca **KPU...Hal 7**

Eceran Rp 6.000/eksemplar. Langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim

Mutasi Covid-19 Inggris Makin Menyebar

Setelah Korsel, Muncul di India

NEW DELHI – Mutasi Covid-19 yang ditemukan di Inggris terus menyebar ke belahan dunia lainnya. Kali ini pemerintah India melaporkan enam pasien menderita varian virus tersebut. Hal itu membuat banyak negara semakin ragu untuk membuka akses kedatangan bagi Inggris.

Pemerintah India melaporkan bahwa enam penderita virus korona mutasi itu baru datang dari Inggris. Mereka termasuk dalam 114 orang yang tercatat menderita Covid-19 setelah tiba dari Britania Raya. "Semua penderita sudah kami isolasi. Termasuk orang-orang yang sudah kontak dengan mereka," tulis pemerintah India yang dikutip oleh BBC.

India merupakan salah satu negara yang bergerak cepat setelah mengetahui munculnya varian baru di Inggris. Mereka melarang kedatangan pesawat dari sang bekas penjajah itu hingga akhir tahun. Namun, jumlah penumpang dari Inggris yang datang hingga akhir November mencapai 33 ribu jiwa.

Saat ini jumlah kasus Covid-19 di India mencapai 10 juta, kedua tertinggi setelah AS. Mereka juga mencatat 150 ribu kematian akibat virus tersebut. Kasus harian yang dilaporkan Selasa (29/12) melebihi 16 ribu.

Otoritas kesehatan India dikabarkan segera memberikan izin untuk vaksin yang dikembangkan AstraZeneca-Oxford University. Mereka berencana membagikan vaksin untuk 300 juta orang pada awal Januari. Vaksin AstraZeneca-Oxford University menjadi harapan bagi negara miskin dan berkembang karena faktor harga dan pendistribusian yang lebih mudah.

Sebelumnya, Korea Selatan (Korsel) juga melaporkan tiga kasus varian Covid-19 asal Inggris. Tiga pasien itu merupakan keluarga yang tinggal di London dan tiba di Korsel 22 Desember lalu. Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) mengumumkan, mereka melarang penerbangan dari Inggris hingga 7 Januari 2021.

"Kami juga mewajibkan pengunjung dari Inggris atau Afrika Selatan untuk menyerahkan bukti negatif Covid-19 sebelum berangkat menuju Korsel,'" ujar Kepala KDCA Jung Eun-kyeong kepada Agence France-Presse.

Korsel memutuskan lebih ketat dalam mengawasi persebaran virus korona setelah terserang gelombang ketiga. Kasus di Seoul dan sekitarnya bertambah seribu tiap hari meski standar social distancing ditingkatkan ke level tertinggi.

Negara lain merasakan frustrasi yang serupa. Misalnya, Australia. Mereka bingung menangani lonjakan wabah di kota bisnis dan wisata Sydney. Yang lebih parah, mereka baru mengetahui adanya sekelompok turis yang malah berpesta di tengah suasana mencekam tersebut.

Pada Natal (25/12), para turis backpacker ketahuan asyik berpesta di Pantai Bronte. Mereka tak mengindahkan social distancing dan tak menggunakan masker. Video mereka berdansa, bernyanyi, dan minum alkohol menjadi viral di Australia.

"Pemandangan ini mengerikan. Mereka seperti tak peduli pada warga Sydney," ungkap Menteri Kesehatan Negara Bagian New South Wales Brad Hazzard.

Masyarakat Sydney geram karena mereka harus menuruti imbauan pemerintah untuk tetap di rumah selama libur Natal dan tahun baru. Mereka harus rela tak berkumpul bersama keluarga besar. Namun, turis yang diduga sebagian besar berasal dari Inggris itu malah bebas berpesta.

"Saya mendengar banyak aksen Inggris," ujar Peter Hanna, jurnalis lokal yang menyaksikan kejadian tersebut.

Pada akhirnya, polisi membubarkan massa tanpa hukuman apa pun. Keputusan tersebut diambil karena mereka merasa tak punya sumber daya untuk memproses semua peserta pesta. Namun, warganet mengatakan, tindakan aparat terlalu lembek.

Selasa lalu Menteri Imigrasi Australia Alex Hawke mengatakan bahwa wisatawan tersebut bisa dideportasi. Meskipun, dia tak memerinci langkah pemerintah untuk melacak para pelanggar protokol kesehatan pada momen Natal itu. "Jika ada orang asing yang mengancam keamanan atau kesehatan umum, visa mereka bisa dicabut," ungkapnya.**(bil/c6/bay)**

Polisi Panggil PT BSL

Sambungan dari halaman 1

Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP. Rahmat Hadi Fitrianto, SH, S.IK disampaikan Kanit Tipidter Ipda. Priyanto, SH menyampaikan berdasarkan pemberitaan Harian Rakyat Bengkulu (RB) edisi Selasa (29/12) berjudul "Limbah di Sungai Hitam", pihaknya akan meminta penjelasan kepada PT BSL.

"Ya ada rencana pemanggilan untuk koordinasi mengenai limbah itu," kata Kanit Tipidter

Dikatakan Priyanto, pihaknya masih hanya sebatas meminta keterangan soal limbah pabrik PT BSL. Dimana secara kasat mata Priyanto mengaku sungai Mertam warnanya sudah berubah dari jernih menjadi hitam.

Sungai Mertam di Desa Sukajaya, Kecamatan Kedurang Ilir sekarang berwarna hitam dan mengeluarkan bau busuk. Diduga kuat tercemar oleh limbah pabrik PT BSL. Pabrik ini mengola tandan buah segar (TBS) menjadi Crude Palm Oil (CPO). Lokasinya berada di Desa Sukajaya. Di sana terdapat 11 kolam penyimpanan limbah dari pabrik. Ada dua kolam yang menampung limbah pabrik hingga boleh dibuang ke Sungai Martam. Versi PT BSL, limbah berupa cairan sudah benar-benar bersih dari zat berbahaya.

Penelusuran RB di lokasi, limbah dibuang PT BSL melalui pipa langsung ke Sungai Mertam. Limbah dibuang masih berwarna keruh dan cokelat pekat. Berbau. Dari tempat pembuangan limbah hingga muara atau hulu sungai, air berwarna hitam dan berbau sangat pekat. Panjang sungai diduga tercemar itu sekitar 3,5 km.

Panjang Sungai Mertam sebenarnya sekitar 20 km. Mulai dari Kedurang sampai Kedurang Ilir. Faktanya sungai berwarna hitam hanya 3,5 km dari titik sungai dibuang limbah PT BSL di Desa Sukajaya hingga muara sungai.

Sementara itu Ketua DPRD BS Barli Halim, SE mengaku mengapresiasi pemberitaan yang dilakukan RB. Karena jelas Barli media harus aktif memberitakan soal daerah dan kemajuan bagi daerah dan tidak hanya sebatas berita serimonial saja.

Oleh karena itu dia sangat mendukung langkah RB melakukan berita investigasi soal limbah pabrik PT BSL. Namun yang paling dikuatkan Barli yakni lembaga DPRD BS mengecam keras setiap kelompok yang tidak mentaati usaha dengan regulasi dan aturan yang ada di BS.

"Saya dari lembaga setelah tahun baru (2021) akan turun lapangan. Setiap orang atau kelompok yang punys usaha, harus sesuai dengan regulasi yang ada," kata Barli.

Oleh sebab itu Barli berharap pada pihak perusahaan untuk dapat berkerja dan menjalankan semua syarat perusahaan dengan baik. Senada disampaikan Tokoh Masyarakat Kedurang Oni Lutfi. Dia sangat mengapresiasi langkah RB melakukan invetigasi soal limbah di sungai Mertam. Bahkan sudah menyesalkan persoalan ini, karena jelas Oni permaslahan limbah di BSL sudah lama dan tidak asing lagi. Oleh sebab itu dia berharap pada instansi terkait untuk dapat berkerja dengan serius dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) BS.

Dia tidak ingin menuduh atau menyalahkan siapapun, namun baginya pemerintah wajib serius melihat permasalahah limbah itu. "Kalau tanggapan kami dari masyarakat, DLHK patut dicurigai tidak serius masalah limbah.Karena limbah itu permasalahannya sudah kroni, dari tahun ketahun. Disinilah ada permainan dari BSL karena kalau musim penghujan limbah disalurkan ke sungai dan kalau ada sidak ditutup," papar Oni

Sedangkan pihak PT BSL kembali menyampaikan terkait pemberitaan RB yang menyebutkan banyak ikan mati di sungai Mertam yang diduga akibat limbah pabrik BSL, Humas PT BSL Idius Safari, SH mengklaim kalau ikan yang mati disungai adalah perbuatan orang yang tidak senang dengan pihak. Oleh sebab itu dia menuduh ada oknum yang sengaja membuat ikan mati seolah-olah dari limbah pabrik.

"Bisa saja orang yang tidak senang lalu membuat ikan mati, bisa saja itu diracun orang karena tidak senang dengan PT BSL," klaim Idius.

RB mendapatkan bocoran dokumen hasil labolatorium Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Bengkulu Selatan. Menguatkan dugaan Sungai Mertam telah tercemar. Pihak DLHK BS pun mengakui standar Ph limbah 6-9. Namun limbah yang dikeluarkan dan dialirkan ke sungai Mertam di angka 9. Seperti N-Total 1.8 dan temeperatur 28.5. Inilah yang membuat sungai Mertam tercemar sehingga airnya berubah warna menjadi hitam dan berbau busuk. Hasil lab menyebut kandungan ammonia mencapai 8.7, nitrate 1.72, nitrogen 1.50.

Ditanya soal hasil labolatirum tersebut, Kepala DLHK BS Ir.Jonior Hafis didampingi Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan DLHK BS Maemson Victory, S.Sos dan staf Ria mengakui Sungai Mertam berwarna di hulu pabrik. Hal ini disebabkan oleh dampak pembuangan limbah PT BSL.

PT BSL disebutkan Jonior sengaja membuang limbah ke Sungai Mertam, dengan alasan limbah telah memenuhi syarat. Akan tetapi kenyataannya, limbah yang dibuang oleh perusahaan tersebut tidak memenuhi syarat sehingga menyebabkan sungai tercemar.

"Ya berdasarkan kasat mata sungai sudah berubah. Dan memang limbah yang disalurkan langsung ke sungai Mertam, yang jadi masalah limbah itu belum memenuhi syarat dan langsung dibuang dan menyebabkan pencemaran," ujar Jonior. **(tek)**

Modal Inti Bank Bengkulu Lebih Rp 1 Triliun

Sambungan dari halaman 1

Agusalim mengatakan, setelah penyetoran tahap pertama dilakukan tahun 2020, penyetoran Dana Setoran Modal tahap kedua akan dilakukan sampai dengan bulan April 2021. Pengambilan saham oleh PT. Mega corpora telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana Bank Bengkulu dan Pihak PT. Mega Corpora kedepannya akan menjalin kerjasama dalam kegiatan usaha bank.

Dalam kegiatan usaha setelah mencapai BUKU II, Bank Bengkulu akan melakukan ekspansi dengan cakupan kegiatan usaha seperti peningkatan layanan teknologi e-Banking, perdagangan valuta asing,pengembangan produk lainnya yang sebelumnya tidak ada di Bank Bengkulu dan Bank Bengkulu jugabisa melakukan kegiatan penyertaan modal ke depannya.

Hal ini menunjukkan bahwa semakin luasnya jangkauan kegiatan usaha Bank Bengkulu kedepannya. Diharapkan dengan meningkatnya cakupan layanan Bank Bengkulu dapat meraih lebih banyak lagi kepercayaan. Baik itu dari nasabah, maupun mitra-mitra Bank Bengkulu lainnya.

Untuk diketahui, sampai dengan November 2020 lalu Bank Bengkulu berhasil membukukan total aset sebesar Rp. 8,305 trilliun. Total laba bersih mencapai Rp.140 miliar yang tumbuh sebesar 133 persen terhadap target 2020, serta didorong juga oleh ekspansi kredit yang disalurkan Bank Bengkulu sebesar Rp 5,833 triliun.

"Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Bengkulu tercatat sebesar Rp 7,063 triliun," ujar Agusalim.**(ken/rls)**

Jokowi Ingatkan Jangan Ada Potongan

Sambungan dari halaman 1

Supaya tidak terjadi pemotongan pemerintah diantaranya mengubah skema penyaluran bansos. Dari sebelumnya berupa sembako untuk penerima di wilayah Jabodetabek, diubah menjadi bantuan tunai. Nantinya petugas dari PT Pos yang akan menyalurkan ke keluarga atau penerima manfaat.

Jokowi menjelaskan pemerintah tahun depan tetap melanjutkan program perlindungan sosial dengan anggaran mencapai Rp 110 triliun. Diantaranya adalah untuk kartu sembako atau bantuan pangan non tunai sebesar Rp 45,1 triliun. Dana tersebut diperuntukkan bagi 18,8 juta penerima manfaat dengan besaran dana yang diterima Rp 200 ribu/bulan.

Selain itu ada anggaran Rp 10 triliun untuk melanjutkan program kartu Prakerja. Kemudian juga ada dana Rp 3,78 triliun untuk bantuan berupa diskon tagihan listrik selama enam bulan. Yakni mulai Januari sampai Juni tahu depan.

"Yang kita ingin tekankan pertama bansos ini harus disalurkan dimulai bulan Januari," tutur Jokowi. Dia menegaskan pada Januari awal bantuan tersebut harus tersalurkan. Sebab bantuan tersebut akan menjadi pendorong atau trigger pertumbuhan ekonomi nasional.

Kemudian Jokowi menjelaskan untuk wilayah Jabodetabek tahun ini bantuan diberikan dalam bentuk sembako. Tahun depan pemerintah memutuskan bantuan di wilayah Jabodetabek sama seperti di detah lainnya yaitu berupa uang tunai dan disalurkan melalui PT Pos serta perbankan.

Jokowi mengingatkan pencairan bantuan tersebut jangan sampai mundur. Karena bantuan tersebut terkait daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebab dapat mendorong daya beli masyarakat. Konsumsi masyarakat juga terjaga. Bapak tiga anak itu juga mengingatkan supaya data penerima bantuan ahrus klir. Supaya penyaluran tepat sasaran. Dia meminta daerah dilibatkan dalam perbaikan atau updating data.

Usai rapat Menko PMK Muhadjir Effendy memaparkan sejumlah hal. Diantaranya adalah penyaluran bansos tahun ini berjalan baik. Rata-rata serapannya mencapai di atas 90 persen. Bahkan untuk serapan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai sudah 100 persen. Dia berharap untuk yang belum mencapai 100 persen bisa segera diselesaikan.

Mantan Mendikbud itu juga menyampaikan penggunaan bantuan langsung tunai. Dia meminta kepada seluruh keluarga penerima manfaat untuk mematuhi pedoman penggunaan bantuan langsung tunai. Diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan.

"Yang penting wanti-wanti Bapak Presiden tidak untuk membeli rokok. Tidak boleh sama sekali untuk membeli rokok," jelasnya. Muhadjir mengatakan rencananya pemberian bantuan itu dimulai serentak pada awal Januari mendatang. Baik yang melalui PT Pos maupun bank plat merah. Dia juga mengingatkan kepada bank BUMN supaya meminta penerima untuk segera mengambil uangnya ketika sudah tersedia. Tidak untuk ditahan. Supaya uang tersebut bisa segera dibelanjakan dan memperkuat daya beli serta konsumsi rumah tangga.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan persiapan penyaluran bantuan-bantuan rutin untuk tahun depan sudah hampir final. Sebab Kemensos akan mengembalikan data sasaran ke daerah dahulu untuk dicek kembali. Setelah itu data harus dikembalikan lagi ke pemerintah pusat pada 1 Janauri.

"(1 Januari, Red) libur tanggal merah. Kita tidak ada libur," kata mantan Walikota Surabaya itu. Dia ingin menjalankan instruksi dari Jokowi. Supaya pada pekan pertama Januari bantuan sudah bisa diberikan kepada penerima manfaat. Sekaligus membantu perekonomian daerah melalui perputaran uang bantuan tersebut. **(wan)**

Gisel Terancam Belasan Tahun Penjara

Sambungan dari halaman 1

"Saudari GA dan saudara MYD mengakui bahwa memang yang ada di video tersebut adalah dirinya sendiri," beber Yusri. Kemudian, dikuatkan dengan hasil forensik wajah serta gelar perkara yang dilakukan pihaknya.

Berdasarkan hasil pengembangan tim penyidik, keduanya menyatakan bahwa video tersebut dibuat tiga tahun lalu. Yakni, di salah satu hotel di daerah Medan, Sumatera Utara. "Terjadi sekitar tahun 2017 ya," tegas Yusri.

Dalam waktu dekat, pihaknya berencana memanggil kembali kedua tersangka guna pemeriksaan lebih lanjut. Kini, mereka terancam pasal 4 ayat 1 juncto pasal 29 dan atau pasal 8 UU No 44 tentang pornografi dengan hukuman 6 hingga 12 tahun penjara.

Sementara Gisel belum menggubris panggilan telepon maupun pesan singkat yang dilayangkan Jawa Pos. Begitupun dengan manajernya, Andi yang enggan berkomentar. "Halo, Halo," katanya lalu menutup telepon.

Sebelumnya, pelantun lagi Pencuri Hati tersebut sudah menjalani BAP sebanyak dua kali didampingi kuasa hukumnya, Sandy Arifin. Yakni pada 16 November dan 23 Desember lalu di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Namun usai diperiksa selama kurang lebih lima jam, Gisel pelit bicara. Dia ogah mengungkapkan terkait pembahasan dan jumlah pertanyaan yang disodorkan tim penyidik. Kendati demikian, ibu satu anak tersebut berjanji bakal mengikuti jalannya proses penyidikan dengan kooperatif.

Polisi juga telah menangkap dua tersangka pelaku penyebar masif video panas tersebut, yakni PP dan NN. Kepada penyidik, keduanya mengaku melakukan tindakan itu demi menambah jumlah followers di media sosial mereka.

Video panas yang sempat membuat heboh publik pertengahan November lalu itu dilaporkan oleh pengacara Pitra Romadoni Nasution. Sebab menurutnya, video tersebut mulai meresahkan masyarakat dan berdampak pada anak-anak.

Dari sisi Psikologi Forensik, sebenarnya seorang pasangan suami istri membuat video intim itu merupakan hal wajar saat ini. Hal tersebut bagian dari kesenangan mereka. Pakar Psikologi Forensik Reza Indra Giri menurutkan, persoalannya adalah bila video dibuat bukan oleh suami istri. Walau tampaknya keintiman itu tidak bisa dipidana, tapi jelas melanggar norma agama dan kepatutan di masyarakat. "Jugamenjadi persoalan pidana bila video intim ini disebarluaskan, terlepas pasutri atau bukan," tuturnya.

Pada situasi kegiatan intim dilakukan oleh bukan pasangan suami istri, terjadi kevakuman hukum. Saat ini masih dilakukan revisi KUHP dan kalau jadi revisi itu dalam salah satu pasal ada tentang pelaku hubungan seks di luar pernikahan. "Baru jadi pidana, dan dipandang sebagai perzinahan," jelasnya.

Untuk KUHP, selamaini mensyaratkan salah satu atau keduanya sudah menikah. Terjadi perbedaan anatra KUHP dan norma masyarakat."Jelas yang harus diubah KUHP-nya," terangnya dihubungi Jawa Pos kemarin.

Berkaitan dengan penetapan Gisel dan pria berinisial MYD sebagai tersangka, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menyatakan, aparat penegak hukum tidak bisa memidana mereka bila keduanya tidak pernah menghendaki video intim mereka berdua disebar kepada publik. "Dalam konteks keberlakukan UU pornografi, orang dalam video yang tidak menghendaki penyebaran video tidak dapat dipidana," ungkap peneliti ICJR Maidina Rahmawati kemarin.

Maidina menyebut, pasal 4 UU Pornografi jelas memberi Batasan. Pasal itu mengatur bahwa pihak-pihak yang melakukan perbuatan tidak dapat dipidana apabila dilakukan dengan tujuan untuk diri sendiri atau kepentingan pribadi. "Dengan demikian, perbuatan membuat pornografi tidak bisa dipidana apabila dilakukan untuk kepentingan diri sendiri," bebernya. Tidak hanya itu, risalah pembahasan UU itu menjelaskan, yang didefinisikan sebagai perbuatan kriminal adalah pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi di ruang publik.

Menurut dia, kalimat di ruang publik juga harus diperhatikan. "Selama konten tersebut adalah kepentingan pribadi, sekalipun sebagai pemeran dalam suatu konten, ketentuan hukum dan konstitusi di Indonesia melindungi hak tersebut," jelasnya. "Perbuatan tersebut tidak dapat di pidana, larangan menjadi model tetap harus dalam kerangka komersial, bukan kepentingan pribadi," tambahnya. Untuk itu, ICJR menekankan supaya aparat kepolisian memastikan bisa membuktikan bahwa Gisel dan MYD menghendaki penyebaran video tersebut.

Bila tidak, lanjut Maidina, keduanya merupakan korban yang harus dilindungi. "Polisi harus kembali ke fokus yang tepat. Yaitu penyidikan kepada pihak yang menyebarkan video tersebut ke publik," terang dia. Peneliti CISSReC Ibnu Dwi Cahyo menambahkan bahwa, lembaganya turut memberi catatan terhadap peredaran video syur Gisel dan MYD. Mereka mengingatkan bahwa konten apapun yang sudah tersebar di media sosial dan aplikasi pesan singkat akan sangat sulit dihapus.

Untuk itu, siapapun yang menghendaki konten pribadi tidak tersebar luas, harus bisa menjaga konten itu dengan baik. Bila tidak, bukan tidak mungkin bisa diproses hukum sebagaimana yang dialami oleh Gisel dan MYD. Dia pun menyebut, penggunaan pasal lain di luar UU Pornografi sangat mungkin dilakukan. Termasuk pasal dalam UU ITE. "Bisa banget kena UU ITE pasal 27 ayat 1," imbuhnya.

Meski tidak sebesar UU Pornografi, ancaman hukuman dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE cukup lama. Yakni lima sampai enam tahun penjara. **(jpg)**

KPU Provinsi Tunggu Instruksi MK

Sambungan dari halaman 1

"Kita memfokuskan ke masing-masing kabupaten untuk mempersiapkan dokumen yang ada di lokus kabupaten. Karena untuk dokumen yang ada di kotak itu masih dilarang, dan menunggu instruksi dari MK untuk buka itu," jelas Eko, Selasa(29/12).

Khususnya larangan untuk membuka kontak suara, yang masih tersimpan rapi di kotak suara itu. Misalnya pihaknya tidak diperkenankan untuk mengambil C daftar hadir, atau mengecek daftar hadir penggunaan hak pilih menggunakan KTP yang ada di kotak itu.

"Itu nanti di kotak suara nunggu MK. Itu tidak boleh dibuka sebelum ada perintah MK. Dan itu jadwalnya setelah BRPK (Buku Registrasi Perkara Konstitusi, red) keluar," imbuhnya.

Sementara itu, salah satu tim hukum Agusrin-Imron, M. Zetriansyah menyampaikan bahwa kemarin, pihaknya telah menyerahkan tambahan bukti untuk kelengkapan administrasi dan perbaikan berkas untuk persyaratan Akta permohonan lengkap (APL).

"Tadi tim kita yang ada di Jakarta sudah menyerahkan, diantaranya perbaikan permohonan, surat kuasa, daftar alat bukti, serta alat bukti ke MK. Masing-masing itu ada 4 ," jelasnya.

Kemudian, ia menjelaskan apabila nanti gugatan itu dinyatakan telah memenuhi syarat, maka akan berlanjut ke tahapan selanjutnya. Yakni menunggu waktu digelar persidangan.

"Baru nanti diberitahukan kepada pihak tergugat dengan pihak-pihak terkait. Setelah itu akan diberikan relase untuk pemberitahuan hari sidang dari MK ya," tambahnya.

Kendati demikian, ia memastikan bahwa pihaknya telah siap dengan bukti-bukti yang memperkuat gugatan kliennya dalam gugatan MK itu. Dan dalam gugatan itu ada dua poin besar. Yakni, pertama yang pihaknya mendalilkan bahwa ada 100 ribu penggelembungan suara diduga oleh salah satu Paslon. Serta pihaknya juga menduga ada 60 ribu suara untuk paslon nomor urut 3 Agusrin-Imron, yang dirusak.

Terpisah, terkait gugatan yang diajukan oleh paslon nomor urut 3 Agusrin-Imron itu, Juru Bicara Paslon Rohidin-Rosjonsyah, Zulkarnain Kaka Jodho, menyampaikan bahwa pihaknya memberikan apresiasi atas tindakan itu.

"Pada prinsipnya Paslon Rohidin-Rosjonsyah beserta timnya, berpendapat bahwasanya itu hak politik Paslon Agusrin-Imron," sampainya.

Namun kendati demikian, pihaknya juga berharap agar semua pihak dapat bersama-sama untuk mendorong kemajuan Provinsi Bengkulu ini. Mengingat Pilkada sudah selesai, dan saat ini, menurutnya adalah waktu untuk kembali kepada sesama sebagai warga Provinsi Bengkulu, untuk mendorong dan memajukan kesejahteraan Bengkulu. Tentunya untuk memberikan kesempatan kepada Rohidin-Rosjonsyah untuk membangun Bengkulu yang maju dan sejahtera. Sebagai peraih suara terbanyak dari Pilgub beberapa waktu lalu.

"Hasil yang diperoleh daripada ketetapan yang diperoleh dari KPU itu sudah selesai. InsyaAllah saya yakin itu bagian dari pada dinamika. Dan itu kita wajib memberikan apresiasi," ucap Zulkarnain. **(war)**

ARIE/RB

DIBEKUK: Sat Reskrim Polres Kepahiang saat membekuk pelaku persetubuhan, kemarin (29/12).

Ayah dan Anak Setubuhi Gadis Bawah Umur

Korban Dicekoki Pil Anjing Gila

KEPAHIANG – Sungguh kompak kelakuan ayah dan anak berinisial IN (42) dan LN (20) warga Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi ini. Mereka berduag nekat menyetubuhi Kembang (15) bukan nama sebenarnya, gadis asal Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong (RL).

Alhasil, kedua ayah dan anak ini dibekuk bersama tiga tersangka lainnya yakni ND (16) warga Kelurahan Tempel Rejo Kecamatan Curup Selatan RL, MK (18) warga Desa Durian Depun Kecamatan Merigi, dan Li (17) seorang wanita warga Desa Suro Ilir Kecamatan Ujan Mas.

Kapolres Kepahiang AKBP Suparman, S.IK, M.AP melalui Kasat Reskrim Iptu Welliwanto Malau, S.IK, MH mengungkapkan, penangkapan atas kelima tersangka bermula dari laporan yang disampaikan keluarga korban ke Mapolres Kepahiang pada Senin (28/12) lalu.

Dalam laporan tersebut, pihak keluarga korban mengadukan bahwa korban sudah disetubuhi oleh beberapa orang pada Jumat (24/12) lalu sekitar pukul 22.30 WIB di Desa Simpang Kota Bingin Kecamatan Merigi.

Dari laporan tersebut, aparat kemudian bergerak memburu para pelaku dan akhirnya berhasil diamankan sekitar pukul 18.00 WIB kemarin (29/12).

"Korban ini disetubuhi ramai-ramai oleh 4 orang pelaku, yakni IN, LN, ND dan MK. Diantaranya ada yang berstatus ayah dan anak, yakni IN dan LN. Sebelum disetubuhi, korban lebih dulu dicekoki pil anjing gila oleh para pelaku," terang Welliwanto.

Selain mengamankan keempat tersangka, aparat juga mengamankan Li yang diduga sebagai mucikari korban. Li ini diduga yang menghubungi korban dan menginformasikan bahwa ada orang yang ingin berhubungan badan dengan korban.

Adapun proses penangkapannya, sambung Welliwanto, untuk pelaku LN, ND, dan MK ditangkap ketika sedang berada di rumah LN. Sementara IN diamankan saat sedang mancing tak jauh dari rumahnya, kemudian pelaku Li diamankan rumahnya di Desa Suro Ilir.

"Saat ini kelimanya masih kita amankan di Mapolres Kepahiang, untuk penyelidikan lebih lanjut. Sementara beberapa barang bukti juga sudah kita amankan, berupa kasur, bantal guling, bantal tidur, sprai, selimut, dan lainnya," demikian Welliwanto. **(sly)**

Awal Tahun, Polda Limpahkan 4 Tsk Korupsi

BENGKULU – Dikretorat Reskrimsus Polda Bengkulu awal tahun 2021 akan melimpahkan empat tersangka korupsi ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu. Empat tersangka itu, yakni Sekretaris DPRD Seluma, Eddy Soeprapto yang terlibat kasus dugaan korupsi anggaran bahan bakar minyak dan pemeliharaan kendaraan dinas di Sekretariat Dewan Seluma tahun 2017.

Kemudian Gusiawan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bujang Hendri kontraktor pelaksana dan Evi Novianti selaku pemodal dari pemborong yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi gedung akademik center IAIN Curup. Berkas dua perkara korupsi tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh JPU.

Hal ini dibenarkan oleh Direktur Reskrimsus Polda Bengkulu, Kombes. Pol. Dedy Setyo Yudo P, S. STMK, melalui Kasubdit Tipikor Kompol. Imam Wijayanto, S. IK, saat dikonfirmasi RB. "Kemungkinan setelah operasi Nataru," katanya melalui pesan WhatsApp.

Imam memastikan tidak ada kendala dalam melengkapi berkas. Sehingga tersangka bisa dilimpahkan nantinya. "Tidak ada kendala," singkatnya.(**wij**)

DEDY SETYO YUDO

WINDI//RB

AMANKAN: Tiga tersangka penganiayaan diamankan Polsek Ratu Agung.

Amankan Tiga Tersangka Penganiayaan

BENGKULU - Tiga pemuda berinisial RT (19), RA (21) dan JA (21) diamankan Polsek Ratu Agung, di rumah mereka masing-masing, Senin (28/12) pukul 22.01 WIB. Lantaran dilaporkan telah mengeroyok Andrean Prasetyo (17) warga Kelurahan Kebun Kenanga, Minggu malam (27/12) pukul 23.00 WIB.

Kronologis kejadian, tiga tersangka ini bersama rekannya yang masih buron yakni EN, IS dan PI ini duduk didepan Bencoolen Mal. Mereka berencana mengunjungi kediaman korban. Tiba disana mereka langsung mendobrak pintu kos, saat korban tertidur.

Mereka langsung memukul korban yang terbangun lantaran bunyi dobrakan pintu itu. Atas kejadian tersebut korban mengalami luka berat di kepala dan lengan.

Hal ini disampaikan oleh Kapolsek Ratu Agung Iptu Noviaska SH. "Berawal dari laporan polisi, ke korban dimana adanya peristiwa pengeroyokan. Kita amankan ketiga pelaku ini di tempat terpisah ada di Jalan Pagar Dewa, Nusa Indah dan Teluk Segara," ujarnya

Hingga sampai saat ini, penyidik masih mencari keterangan dari para tersangka terkait niat mereka untuk mengeroyok korban. Dari hasil pemeriksaan anggota ditemukan pecahan botol dan kayu yang diduga digunakan untuk memukul korban. "Masih ada pelaku buron, tiga orang lagi," terangnya.

Sebelum mereka melancarkan aksinya mereka ini dipengaruhi minuman keras. Dalam penyelidikan salah satu pelaku ini tersinggung dengan perkataan korban, merasa kesal akhirnya pelaku mendatangi kediaman korban dengan mengajak teman lainnya untuk mengeroyok korban namun kita masih mendalami lagi motifnya. Dari kejadian tersebut, para pelaku diancam dengan pasal 80 UU 35 tahun 2014 karena korbannya anak di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak," tutup Noviaska.

Sementara itu, tersangka RI diketahui berstatus sebagai mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Bengkulu, mengatakan dirinya melakukan hal tersebut lantaran dendam dengan korban. Karena sebelumnya korban bersama teman-temannya pernah melakukan pemukulan terhadapnya. "Saya dendam karena sebelumnya dia (korban) sama teman-temannya mengeroyok saya. Jadi saya balas saya datangi dia di kosannya," kata RI. (**wij**)

Bertandang ke Kosan Kawan, Motor Raib

BENGKULU – Tris Yudesta (20), warga Desa Padang Cukur Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, menjadi korban pancurian. Motor Yamaha Mio GT BD 3178 PS miliknya digasak maling, saat sedang bertandang di kosan temanya di Jalan Cimanuk Kelurahan Jalan Gedang. Kejadian ini berlangsung Senin (29/12) dini hari.

Diceritakan teman Korban beranama Rekardo, kalau Tris Yudesta yang bekerja di BFC di Kelurahan Bentiring, memang setiap malam libur kerja korban selalu nginap di kosannya. Namun tidak disangka pada malam itu motor korban di gasak maling, "Memang Tris kalau libur nginap di sini. Malam itu motor sekitar jam 23.00 WIB di parkir di teras, memang seprti biasa motor tidak di masukan ke dalam. Sekitar pukul 02.00 WIB saya belum tidur dan mengecek motor masih ada, tapi waktu Tris berencana masuk kerja motor tidak ada," ceritanya.

Waktu itu motor yang diparkir di teras kosannya ada empat unit. Namun maling mengambi motor milik Tris. Rekardo juga menceritakan kalau malam itu bukan hanya motor Tris menjadi terget pencurian. Salah satu motor milik warga sekitar juga hampir digasak pencuri. Namun baru berjalan 20 meter, motor tersebut kehabisan minyak. Akhirnya pelaku meninggalkan motor itu. "Kalau motor di sini ada empat motor. tapi malam itu ada juga motor tetangga sini yang hampir hilang. Tapi keran motornya habis minyak maka motor ditinggalkan," cerita Rekardo.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 14 juta. Kasus in telah dilaporkan Ke Polsek Gading Cempaka. (**wij**)

WINDI//RB

TUNJUKAN: Rekan Korban menunjukan tempat sepeda motor sebelum digasak maling.

Vonis Mantan Kadistan Mukomuko Awal Tahun Baru

MUKOMUKO – Terdakwa perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan alat berat milik pemerintah, Heri Prastyono, S.STP, M.Si, masih harus bersabar. Ia belum bisa mendapatkan kepastian hukum secepatnya, sebelum berakhirnya tahun 2020. Jika tidak ada aral melintang, Mantan Kadis Pertanian (Kadistan) Kabupaten Mukomuko ini baru akan dapat kepastian hukum, awal tahun depan.

Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko, Andi Setiawan, SH, mengatakan, vonis yang bersangkutan, direncanakan 7 Januari 2021 mendatang. Sebagaimana sudah diagendakan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Insya Allah, tanggal 7 Januari 2021. Sesuai yang dijadwalkan oleh majelis hakim," kata Andi.

Sebelumnya, agenda pembacaan putusan sempat diagendakan pada 22 Desember 2020 lalu. Hanya saja, ketika tiba waktunya, pembacaan putusan yang terdakwa, belum siap. Sehingga sidang dengan agenda pembacaan putusanpun, ditunda sampai memasuki awal tahun 2021. "Pembacaan putusan saat itu belum siap," imbuhnya.

Seperti apa vonis atas terdakwa yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian Mukomuko, baru akan diketahui dalam sidang tersebut. Pastinya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah menuntut yang bersangkutan dan sangat yakin, sudah terjadi tindak pidana korupsi.

Meskipun JPU sendiri menarik diri dari menjerat terdakwa dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

"Dari pemeriksaan dan bukti-bukti di pengadilan, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair. Sehingga kita pun menuntut membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair itu," kata Andi.

Terdakwa lanjutnya, dinilai JPU terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair. Dengan begitu, menjerat terdakwa dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 pada UU yang sama.

Sehingga tuntutan JPU, agar majelis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, selama setahun dan tiga bulan. Tentunya dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan. Selain itu, agar terdakwa dikenakan membayar denda sebesar Rp 50 juta dengan subsidair tiga bulan kurungan.

"Terus menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 83,1 juta. Sebagaimana uang itu kini sudah dititipkan terdakwa, dikompensasikan, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti," demikian Andi. (**hue**)

Elwin Agustian Khahar

Kades Dituntut 18 Bulan Penjara

Baru Kembalikan Rp 40 Juta

ARGA MAKMUR – Kades Tanjung Raman non aktif, Suranto yang kini duduk di kursi pesakitan terkait kasus korupsi dituntut 18 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari BU. Suranto menjadi terdakwa kasus korupsi dana BUMDes tahun 2017-2019 dan pembangunan sarana olahraga berupa kolam renang.

Kajari BU Elwin Agustian Khahar, SH, MH melalui Kasi Intel BU Denny Agustian, SH, MH menjelaskan selain tuntutan penjara 18 bulan, jaksa juga menyertakan hukuman tambahan berupa pidana denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan.

"Selain itu kita juga meminta untuk pengembalian kerugian negara Rp 117 juta subsider 9 bulan kurungan, jika memang kerugian negara dari dana BUMDes dan pembangunan kolam renang tersebut tidak dikembalikan," terangnya.

Tuntutan ini disampaikan JPU dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bengkulu kemarin. Ia menilai fakta persidangan menunjukkan terdakwa Suranto terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menggunakan uang yang bersumber dari Dan Desa (DD) untuk kepentingan pribadinya. Baik itu dari BUMDes maupun dari program pembangunan sarana olahraga. "Kita sampaikan tuntutan tersebut dalam persidangan dan akan dilanjutkan dengan persidangan dengan agenda pembelaan atau pledoi," ujarnya.

Meskipun memang masih tercantum tuntutan pengembalian kerugian negara Rp 117 juta, namun diterangkan Denny, Suranto sudah menyetorkan kerugian negara Rp 40 juta. Pengembalian kerugian negara tersebut dilakukan sebelum penahanan. "Rp 40 juta tersebut dikembalikan saat usai audit Inspektorat. Ia mengembalikan sebagian Rp 40 juta dari kerugian BUMDes. Namun setelah kita lakukan penyelidikan, kita temukan kerugian negara total Rp 117 juta," bebernya.

Nantinya pengembalian Rp 40 juta tersebut akan dihitung. Ia berharap Suranto bisa mengembalikan kerugian negara hingga selesai. Sehingga bisa membantu meringankan beban hukuman yang akan dijatuhkan majelis hakim. "Jika melakukan pengembalian kerugian akan menjadi pertimbangan majelis hakim," ujar Denny.**(qia)**

Tambahan Kasus Covid Menurun

ARGA MAKMUR – Setelah meningkat tajam sejak dua bulan lalu, saat ini penambahan kasus Covid-19 di Bengkulu Utara cenderung menurun. Bahkan kemarin Satgas Covid-19 Provinsi Bengkulu mengumumkan tidak ada penambahan kasus Covid-19 dari warga BU.

Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan BU, Ujang Ismail, SKM, M.Ph menerangkan saat ini sampel swab yang dikirimkan ke Labkesda Provinsi Bengkulu merupakan hasil uji sampel di atas tanggal 9 Desember atau usai pilkada. Sampel tersebut merupakan dari kontak erat kasus maupun suspek Covid-19.

Menurut Ujang, hasil sampel yang dikirimkan tersebut belum seluruhnya dilakukan uji lab. Sehingga belum seluruhnya diketahui statusnya positif atau negatif Covid-19. "Karena tidak semua sampel bisa diuji. Pengujian dilakukan sebagian dan dijumlahkan seluruh kabupaten memang sangat besar," ujarnya.

Dengan berkurangnya kasus Covid-19 di BU, maka sampel swab yang dikirimkan Satgas Covid-19 BU juga berkurang. Saat ini pengambilan sampel swab yang dilakukan Satgas Covid-19 BU belum dilakukan secara massal.

"Kita melakukan pengambil sampel swab melalui tracing kontak erat kasus Covid-19 maupun suspek kasus yang ada di rumah sakit. Kita belum melakukan swab massal," pungkas Ujang.**(qia)**

Keramaian Saat Tahun Baru Bisa Dipidana

ARGA MAKMUR – Sesuai maklumat Kapolri, Kapolda Bengkulu, Irjen. Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si menegaskan melarang aktivitas keramaian dalam perayaan menyambut tahun baru 2021. Aktivitas keramaian di masa pandemi Covid-19 bisa dijerat dengan hukuman pidana.

Kapolda mengatakan bersama Satgas Covid-19 BU, polisi akan membubarkan semua kegiatan keramaian. Polisi akan melakukan patroli agar masyarakat tetap di rumah maupun mematuhi protokol kesehatan. "Tahapannya, bisa kita lakukan secara persuasif lebih dulu dengan meminta agar acara dibubarkan sendiri. Berikutnya kita bisa membantu membubarkan dan mengatur sesuai dengan protokol kesehatan," terangnya.

Namun jika saat upaya yang dilakukan polisi untuk membubarkan kegiatan keramaian mendapatkan perlawanan, Kapolda menegaskan polisi bisa menjerat penyelenggaranya dengan pasal pidana. "Pidananya terkait dengan melawan polisi yang tengah menjalankan tugas," ujarnya.

Polisi juga akan menjerat pasal pidana sesuai Undang-undang Kekarantinaan jika memang acara yang menyebabkan kerumunan tersebut sudah direncanakan lebih dulu. Seperti didahului dengan undangan atau adanya panitia pelaksana. "Karena sudah jelas saat ini dilarang menggelar acara yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Kita akan mengambil tindakan tegas dan bekerjasama dengan Pemkab BU," terang Kapolda.

Kapolda mengaku sudah berkoordinasi dengan Bupati BU Ir. Mian sebagai Ketua Satgas Covid-19 BU untuk bekerjasama dalam menerapkan aturan protokol kesehatan dimasa pandemi Covid-19. Ia mengimbau masyarakat untuk merayakan pergantian tahun di rumah saja tanpa ada keramaian.

"Saya sudah berkoordinasi dengan pak Bupati dan saya mengimbau lebih baik merayakan tahun baru di rumah saja. Karena saat ini kita masih dalam masa pandemi," imbau Kapolda.**(qia)**

SHANDY/RB

RESMIKAN: Kapolda Bengkulu, Irjen. Pol. Teguh Sarwono menggunting pita tanda peresmian GSG baru milik Polres Bengkulu Utara.

Kapolda Cek Kesiapan Pengamanan Tahun Baru

Resmikan GSG Polres BU

ARGA MAKMUR – Kapolda Bengkulu Irjen. Pol. Drs. Teguh Sarwono, M.Si melakukan kunjungan resmi pertamanya ke Polres Bengkulu Utara (BU), kemarin (29/12). Kedatangannya juga disambut Bupati BU Ir. H Mian dan jajaran FKPD BU.

Kapolda mengatakan kunjungannya ini untuk melihat kesiapan personel dalam melaksanakan Operasi Lilin Nala yang kini tengah berlangsung. Setelah berhasil mengamankan perayaan Natal 25 Desember lalu, kini polisi dituntut berhasil melakukan pengamanan menyambut tahun baru 2021. "Tahun ini kita bukan hanya fokus pada pengamanan, namun juga harus aman, lancar dan sehat. Sehingga saya datang ke Polres untuk mengecek kesiapan personel," terangnya.

Ia menuturkan dalam operasi lilin ini polisi bukan hanya memastikan kelancaran lalu lintas dan keamanan masyarakat, baik yang beraktivitas maupun yang melaksanakan ibadah. Namun juga memastikan masyarakat terutama di BU bisa tetap sehat di tengah pandemi Covid-19.

"Karena saat ini dalam masa pandmei Covid-19. Sehingga masyarakat yang sehat itu sangat penting," ujar Kapolda.

Dalam kunjungannya, Kapolda juga meresmikan bangunan Gedung Serba Guna (GSG) milik Polres BU yang baru tuntas dibangun berkat kerjasama dengan Pemkab BU. Selain itu juga renovasi Polsek Enggano yang merupakan Polsek kepulauan terluar Indonesia yang ada di BU.

"Kita berterima kasih dengan Pemkab BU yang sudah mendukung Polres BU. Tentunya ini untuk kelancaran tugas dalam menciptakan keamanan dan pelayanan bagi masyarakat," kata Kapolda.

Kapolda juga mengumpulkan seluruh personel Polres BU untuk memberikan arahan. Ia menginginkan seluruh personelnya paham dengan aturan sehingga lebih mudah dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian. "Pahami dan patuhi aturan," ujarnya.**(qia)**

RSUD Layani Swab Antigen

Biayanya Rp 275 Ribu

ARGA MAKMUR – RSUD Arga Makmur sudah bisa melakukan pemeriksaan dengan rapid test antigen atau swab antigen. Namun pengecekan rapid test antigen ini hanya dilakukan secara mandiri bukan untuk pengecekan yang diberikan secara gratis.

Direktur RSUD Arga Makmur, dr. Jasmen Silitonga, Sp.KK menerangkan pengecekan swab antigen hanya bisa dilakukan secara mandiri dengan biaya sebesar Rp 275 ribu. Biaya ini masuk ke rumah sakit sebagai pendapatan. "Biaya tersebut ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kita hanya mengikuti besarannya. Rp 275 ribu sekali pengecekan," katanya.

Swab antigen ini diberlakukan terutama untuk mereka yang ingin melakukan perjalanan dan sebagai syarat perjalanan terutama menggunakan pesawat. Sehingga dikenakan biaya sesuai dengan aturan Kemenkes. "Sejauh ini sudah ada yang datang untuk melakukan swab antigen. Rata-rata mereka yang ingin melakukan perjalanan," ujarnya.

Selain itu, swab antigen juga digunakan RSUD untuk konfirmasi pasien kasus Covid-19. Swab ini dilakukan pada pasien yang sudah berstatus positif namun sudah dilakukan perawatan dan tidak lagi menunjukkan gejala Covid-19. "Untuk swab konfirmasi kita lakukan. Karena jika harus menunggu swab Covid-19 memang membutuhkan waktu lama. Sehingga untuk konfirmasi kita menggunakan antigen," pungkas Jasmen.

Sementara itu, Kadis Kesehatan BU, Samsul Maarif, SKM, M.Kes menuturkan penggunaan swab antigen cukup baik. Akurasi rapid test antigen di atas 60 persen sehingga bisa menjadi rujukan dalam penanganan medis. "Hasilnya juga bisa diketahui dalam 15 – 30 menit. Pengambilan sampel dengan metode swab langsung pada tenggorokan dan hidung sehingga akurasinya cukup tinggi jika dibandingkan dengan rapid test antibodi yang sampelnya menggunakan darah," beber Samsul.**(qia)**

SHANDY/RB

ANTIGEN : Petugas RSUD Arga Makmur saat melakukan rapid test. Saat ini untuk pengecekan Covid-19 di RSUD Arga Makmur sudah tersedia rapid test atigen atau swab antigen.

ADD Dua Desa Dipastikan Tetap

ARGA MAKMUR – Saat inia da tiga desa yang terjkerat kasus hukum terkait dengan pelaksanaan Dana Desa (DD). Ketiganya adalah Dana Desa Tanjung Raman, Tebat Pacur dan Pondok Baki. Diantaranya ketiganya, hanya Desa Pondok Bakil yang tersangkanya adalah Mantan Kades, sedangkan dua lagi adalah kades non aktif yang kini mendekam di penjara.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) BU, Ir. Budi Sampurno menjelaskan desa yang terjerat kasus hukum maka akan dikenakan sanksi. Sanksinya berupa penundaan penyaluran DD selama minimal satu tahun.

"Kasus hukum ketiga desa ini sudah kita laporkan, terutama dua desa dimana tersangkanya adalah kepala desa yang kini berstatus kepala desa non aktif," kata Budi.

Namun ia mengaku belum ada ketegasan apakah sanksi penundaan penyaluran DD tersebut diberlakukan mulai tahun 2021 pada minimal dua desa tersebut, atau memang ada penundaan pemberian sanksi karena di masa pandemi Covid-19.

"Kita masih menunggu. Namun dalam DD 2021 ada alokasi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bisa jadi ini ditunda karena terkait pandemi Covid-19," terang Budi.

Kalaupun memang sanksi tersebut diberlakukan, Pemkab BU akan tetap menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desa-desa yang terkena sanksi tersebut. Karena ADD digunakan untuk penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa.

"Namun untuk tunjangan memang tidak diberikan jika memang ada sanksi, karena memang tidak ada kegiatan pembangunan yang dilakukan," ujar Budi.

Ia juga berharap jika mulai diberlakukan sanksi, penyaluran BLT tetap dianggarkan dan disalurkan. Sehingga sanksi yang diberikan tidak berdampak langsung pada masyarakat di tengah pandemi saat ini. "Kita berharap BLT tetap ada, karena terkait dengan bantuan ke masyarakat. Namun tentunya tergantung dengan Kementerian Keuangan," jelas Budi.**(qia)**

YUDI/RB

DIBUKA: Fasilitas kesehatan di Kabupaten Seluma tetap akan dibuka walaupun libur akhir tahun.

Libur Tahun Baru, Yankes Tetap Beroperasi

SELUMA - Pemkab Seluma memastikan seluruh pelayanan kesehatan (Yankes) di rumah sakit, Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya tetap akan membuka pelayanannya selama libur Tahun Baru.

Hal tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan meski saat libur akhir tahun. Selain itu, pelayanan kesehatan tetap dibuka juga untuk cepat tanggap apabila ada pasien positif Covid-19 terbaru. Yakni dalam upaya tracing dan swab tes massal guna memutus mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Seluma.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Rudi Syawaludin, S.Sos mengatakan bahwa memang fasilitas kesehatan di Seluma tetap beroperasi seperti biasa meskipun libur nasional. Hal ini dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan kesehatan. Terutama untuk RSUD Tais mengingat menjadi ujung tombang dalam upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Seluma.

Yakni melakukan tracking berupa rapid tes dengan menggunakan rapid tes kit antigen terhadap kontak pasien dan suspect. Selain itu, pelayanan berupa Instalasi Gawat Darurat (IGD) juga tetap dibuka apabila ada masyarakat yang membutuhkan perawatan. Dalam pengoperasiannya, tenaga medis yang bersiaga akan menggunakan sistem piket.

"Untuk fasilitas kesehatan tetap akan dibuka, walaupun libur nasional tapi pelayanan kesehatan masih tetap berjalan," sampai Rudi.

Sementara itu untuk maksimalkan pelayanan kesehatan pada tahun 2021 nanti, pihaknya telah menyiapkan berbagai program. Mengingat target dari Kabupaten Seluma cukup banyak seperti pengurangan kasus gizi buruk, stunting dan lainnya. Juga untuk tetap maksimalkan pelayanan kesehatan di desa/kelurahan, pihaknya akan memberdayakan kader kesehatan dan juga bidan PTT.

Pihaknya akan menugaskan 1 bidan PTT di setiap desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma. Adapun jumlahnya nanti diperkirakan akan sebanyak 202 bidan PTT sesuai jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma.

"Itungannya nanti itu disetiap desa/kelurahan ada 1 orang bidan PTT, kita harap mereka bisa bekerja sesuai tupoksinya, karena visi dan misi dalam sektor kesehatan harus tercapai," pungkas Rudi.**(cup)**

Iuran JKN DTKS Dialihkan ke Pusat

SELUMA - Terhitung 1 Januari 2021 nanti, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma akan menonaktifkan setidaknya 3.990 peserta BPJS Kesehatan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Yang mana dari jumlah tersebut, terdapat jumlah pengurangan dari penerima yang masuk Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 2.592 peseta.

Ternyata penonaktifan ini bukan tanpa alasan melainkan penerima yang masuk dalam DTKS akan dialihkan ke pemerintah pusat. Sehingga bantuan iuran jaminan kesehatannya tidak lagi ditanggung pemerintah daerah.

Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seluma, Herman, S.Sos melalui Kabid Perlindungan Jamsos dan Habilitasi, Aziman SE membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa pada tahun 2021 nanti, penerima Jamkesda sasarannya bukan lagi fakir miskin yang berada didalam DTKS. Maka dari itulah, pada tahun 2021 nanti yang masih tercover Jamkesda Pemkab Seluma hanya sebanyak 8.000 peserta saja.

Dalam hal ini, pihaknya tidak dilibatkan lagi dalam mengurus jumlah penerima Jamkesda di Kabupaten Seluma seperti tahun-tahun sebelumnya. "Benar, untuk tahun depan itu peserta Jamkesda sasarannya bukan lagi fakir miskin yang didalam DTKS, jadi memang ada pengurangan peserta untuk tahun depan," sampai Aziman.

Meskipun begitu, masyarakat yang masuk dalam DTKS tetap akan mendapatkan bantuan jaminan kesehatan. Yakni kepesertaannya akan ditarik ke pemerintah pusat dalam hal ini langsung Kementrian Sosial (Kemensos) RI. Mereka nantinya akan dimasukan dalam penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional. Terkait hal ini, pihaknya masih menunggu teknisnya terlebih dahulu.

"Jadi untuk tahun depan mereka bukan lagi tanggung jawab Pemda, melainkan langsung kepesertaan JKNnya ditarik ke pusat," lanjutnya.

Sementara itu, Dinsos Seluma menargetkan akan melakukan verifikasi dan validasi DTKS di 202 Desa dan Kelurahan pada awal tahun 2021 mendatang. Pembaruan DTSK ini dinilai sangat penting karena sejak beberapa tahun terakhir belum pernah terbarui. Sebab, data tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dalam mendistribusikan bantuan sosial kepada warga yang membutuhkan.

"Untuk data nanti akan kita upayakan awal tahun 2021 sudah diverifikasi ulang, harapan kita ini bisa terwujud," pungkasnya.**(cup)**

Triwulan Pertama, TPG Cair 4 Bulan Sekaligus

SELUMA - Tunjangan Profesi Guru (TPG) terhadap 1.126 guru untuk satu bulan triwulan ke IV terpaksa ditunda pembayarannya. Hal ini dikarenakan anggaran untuk pembayaran TPG yang diterima dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI tidak sesuai dengan nominal yang dibutuhkan. Sehingga sesuai anggaran tersebut, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Seluma baru membayarkan pembayaran dua bulan TPG saja pada triwulan ke IV ini.

Yang mana, untuk sisanya nanti akan disusulkan pada triwulan pertama tahun 2021 mendatang. Sehingga pada triwulan pertama nanti, pembayaran TPG akan diberikan sebanyak empat bulan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, Emzaili Hambali, M.Pd mengatakan kebutuhan anggaran untuk pembayaran TPG para guru itu mengalami kekurangan. Sehingga sesuai anggaran yang diterima, pihaknya hanya bisa melakukan pembayaran dua bulan saja untuk TPG pada triwulan keempat ini. Namun ia memastikan, untuk kekurangan pembayaran TPG itu akan dibayar di awal tahun 2021 mendatang.

"Nanti akan dibayarkan untuk satu bulan itu pada tahun 2021, jangan khawatir karena ini akan tetap dibayarkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Emzaili menjelaskan, bahwa kekurangan anggaran ini akan dibayar pada triwulan pertama di tahun 2021 mendatang. Pada triwulan pertama akan langsung dibayarkan empat bulan oleh pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan Seluma. Penyalurannya sendiri akan dilangsungkan ke rekening masing-masing guru.

Ia mengharapkan tertundanya satu bulan pembayaran TPG ini tidak mengurangi kinerja guru penerima sertifikasi ini. Dirinya mengharapkan kinerja guru bisa tetap fokus dan maksimal dalam melaksanakan tupoksinya. Yaitu maksimal melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai bidang dan tugasnya. Apalagi ditengah pandemi covid-19 saat ini.

"Jadi nanti langsung dibayarkan selama empat bulan saat triwulan pertama di tahun 2021 mendatang, tentunya apa yang menjadi hak seluruh guru pasti akan dibayarkan oleh pemerintah pusat," tutupnya.**(cup)**

YUDI/RB

AKAN DIBANGUN: Di Pantai Pasar Seluma ini, akan dibangun pelabuhan perikanan nasional pada tahun 2021 nanti.

Berpotensi jadi Pelabuhan Perikanan Nasional

SELUMA - Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pelabuhan Seluma yang berada di Desa Pasar Seluma Kecamatan Seluma Selatan direncanakan pembangunan lanjutan pada tahun 2021 nanti. Mengingat, pelabuhan ini sendiri dibangun pada tahun 2017 lalu dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sekitar Rp 1,6 miliar. Alasan pembangunan ini dilanjutkan setelah sekian lama ialah karena berpotensi untuk dijadikan sebagai Pelabuhan Perikanan Nasional.

Hal ini setelah adanya survey yang dilakukan oleh Kementrian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) RI bersama pejabat Pemkab Seluma pada Senin (29/12) pagi.

Dalam kunjungannya, Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air Kemenko Marves, Rahman Hidayat mengatakan jika peninjauan lokasi ini dilakukannya mengingat di Kabupaten Seluma termasuk dalam proyek strategis nasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma).

Dimana Kabupaten Seluma terdapat potensi pelabuhan nelayan dan perikanan yang masih perlu dikembangkan. Selain letaknya yang strategis, potensi yang ada di dalamnya juga melimpah.

"Potensinya perlu dikembangkan karena banyak sekali potensi disini, juga didukung dengan letaknya yang strategis," sampai Rahmat Hidayat pada saat melakukan peninjauan.

Rencananya usai melakulan survey tersebut, pihaknya akan kembali melakukan peninjauan yang direncanakan pada awal Januari 2021 mendatang. Peninjauan kembali tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan rencana program kelanjutan pembangunan TPI pelabuhan nelayan di Desa Pasar Seluma. "Survey akan kembali dilakukan pada bulan Januari mendatang," singkatnya.

Sementara itu, Plt kepala Dinas Perikanan, Jumadi melalui Kabid Perikanan Tangkap, Ali Sadikin mengatakan langkah untuk menjadikan Pelabuhan Pasar Seluma menjadi Pelabuhan Perikanan Nasional harus didukung pengambil kebijakan baik provinsi maupun kabupaten. Karena pembangunan Ini merupakan mega proyek yang setidaknya membutuhkan sekitar 100 hektare lahan.

Sedangkan untuk saat ini Pelabuhan Pasar Seluma hanya memiliki luas lahan kurang lebih 4,8 hektar. Untuk memperluas areal tersebut, nantinya perlu berkoordinasi dan mendudukkan sejumlah pihak terkait. Hal tersebut lantaran diketahui, jika di sekitar area lokasi terdapat lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik perusahaan, lahan Cagar Alam bahkan lahan milik masyarakat sekitar.

"Semua ini perlu dukungan dari semua pihak, untuk memajukan Kabupaten Seluma. Terutama dalam sektor perikanan," pungkasnya.**(cup)**

YUDI/RB

MEMILIH: Tampak masyarakat yang akan menggunakan hak pilih di Pilkada 2020 beberapa waktu lalu, sedang menunggu giliran untuk mencoblos.

Penetapan Bupati Terpilih, Tunggu MK

SELUMA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Seluma hingga saat ini masih menunda penetapan peraih suara terbanyak dalam Pilkada Seluma 2020. Alasannya, KPU Seluma masih menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi (MK) berupa Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

Apabila nantinya BRPK MK tersebut telah keluar dan diterima oleh KPU Seluma, maka paling lama lima hari kemudian akan langsung melakukan penetapan pemenang Pilkada Seluma. Adapun diketahui bahwa pemenang Pilkada Seluma 2020 ialah pasangan calon Erwin Octavian-Gustianto yang meraih suara terbanyak.

Ketua KPU Seluma, Sarjan Effendi SE mengatakan sejauh ini pihaknya belum mendapati adanya laporan pengajuan permohonan gugatan sengketa Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Seluma ke MK. Meski tidak ada gugatan, untuk penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih tetap menunggu terbitnya BRPK dari MK. Hal inilah yang akan menjadi Surat Keputusan (SK) penetapan Bupati – Wakil Bupati Seluma terpilih. Diperkirakan BRPK itu sendiri akan keluar pada pertengahan bulan Januari mendatang.

"Belum, kita masih menunggu BRPK MK terlebih dahulu, jika sudah keluar maka akan langsung kita lakukan pleno penetapan," sampai Sarjan.

Sarjan menambahkan, Jika BPRK sudah diterima maka maksimal paling lama lima hari setelah itu sudah harus ada penetapan pasangan calon terpilih. Namun jika ada pengajuan sengketa maka akan ditunda terlebih dahulu hingga permasalahan itu dianggap selesai.

Diketahui bersama, dalam hasil rekapitulasi suara dalam Pleno Kabupaten yang digelar beberapa waktu lalu, paslon Nomer Urut 3 Erwin Oktavian SE - Drs Gustianto memenangkan Pilkada setelah perolehan suaranya unggul jauh sebanyak 55.638 atau jika dipersentasikan sebanyak 48 persen. Paslon nomer urut 3 unggul jauh dibandingkan dua paslon lainnya.

"Kalau sudah keluar paling lama lima hari sudah harus ditetapkan, jadi kita masih menunggu sampai saat ini, diperkirakan bulan Januari nanti sudah keluar," pungkasnya.**(cup)**

INFO HOTEL

HOTEL	ALAMAT	TELPON / FAX/ HP
LATANSA / SYARIAH	Jl. Tribrata No. 42 Kel. Cempaka Permai (Simpang 4 Polda)	(0736) 52549 / 0812 7103 8847
THE MADELINE	JL. Bakti Husada No. 88 Kel Lingkar Barat	(0736) 52777 / 08117861940
SANTIKA	JL. Raya jati No 45 Kel. Sawah Lebar Kec Ratu Agung, Bengkulu	(0736) 25858

Disuruh Pelihara, Kerbau Dijual

KOTA MANNA - Niat baik Roni Najam (60) warga Jalan A. Yani Kelurahan Tanjung Mulia, Pasar Manna tidak diterima dengan baik oleh YR (35) warga Gunung Mesir, Pasar Manna. Kerbau sebanyak tiga ekor milik Roni diduga dijual oleh YR. Roni akhirnya melaporkan hal tersebut ke Polres Bengkulu Selatan (BS) kemarin (29/12).

Seharusnya kerbau yang dititipkan Roni tersebut dijaga dan dipelihara dengan baik. Namun tiga ekor kerbau itu saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh sebab itu merasa jadi korban dengan hilangnya kerbau miliknya, Roni melaporkan kejadian ini ke polisi.

Dikatakan Roni, dirinya percaya dengan YR, dimana kerbau miliknya dititipkan ke YR. Saat itu YR tidak keberatan untuk memelihara kerbau milik Roni. Pertengahan Maret lalu, kerbau diserahkan ke YR, tapi bulan Juli, kerbau sudah tidak ada lagi.

Setelah ditanyakan ke YR, kerbau tersebut sudah dijual oleh YR dengan berbagai alasan yang disampaikan ke Roni. Merasa dikecewakan, Roni menuntut YR untuk mengganti rugi kerbau miliknya. Akan tetapi melihat tingkah YR semakin hari tidak menunjukkan keseriusan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, Roni akhirnya memperkarakan perbuatan YR.

"Berulang kali ditanyakan ke YR kapan bisa mengganti kerbau itu, tapi YR tidak ada niat baik untuk mengganti kerbau saya, maka saya tempuh jalur hukum," jelas Roni.

Disebutkan Roni, ia mengalami kerugian hingga Rp 35 juta. Namun dengan tidak ada niatan baik yang dilakukan YR, dia berharap pihak kepolisian bertindak. Roni juga memegang surat perjanjian antar kedua belah pihak saat penyerahan kerbau beberapa waktu lalu.

Kapolres BS AKBP. Deddy Nata, S.IK melalui Kasat Reskrim AKP. Rahmat Hadi Fitiranto, SH, S.IK didampingi Kanit Tipidter Ipda. Priyanto, SH mengatakan apabila bukti dan hasil penjelasan dari pelapor sudah lengkap dan cukup, maka pihaknya akan memanggil terlapor guna dimintai keterangan.**(tek)**

RIO/RB

LAPOR: Roni Najam (60) warga Kelurahan Tanjung Mulia melaporkan YR (35) karena diduga menghilangkan kerbau miliknya, Selasa (29/12).

Lintas

Perbaikan Sekolah Rusak

KOTA MANNA –Tahun 2021, sekolah yang tak menerima anggaran perbaikan infrastruktur akan diakomodir. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Bengkulu Selatan (BS) memastikan semua sekolah rusak akan diperbaiki. Kepastian ini karena Dinas Dikbud menerima kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 40 miliar.

HOLMAN

Untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kabupaten BS, Dinas Dikbud memastikan tahun 2021 mendatang tidak ada lagi sekolah tingkat TK hingga SMP negeri sederajat yang tak menerima anggaran perbaikan. Berdasarkan data Dinas Dikbud BS, di kabupaten ini tercatat ada 52 TK, 120 SD 120 dan 130 SMP negeri sederajat.

Sekretaris Dinas Dikbud BS Agustian mengakui pada tahun 2020 lalu masih ada beberapa sekolah yang tidak dapat perbaikan sekolah. Hal ini disebabkan anggaran perbaikan maupun pembangunan sarana yang tersedia dari dana alokasi khusus (DAK) hanya Rp 24 miliar.

"Semua yang rusak akan diakomodir dengan perbaikan, jadi dipastikan tahun 2021 tidak ada lagi sekolah yang rusak parah dan tidak layak huni," terang Agustian. Sekolah yang ingin mendapatkan anggaran rehab maupun pembangunan harus menyiapkan data dapodik yang sesuai dengan kondisi kebutuhan.

Terpisah, anggota Komisi III DPRD BS Holman, SE berharap apa yang sudah direncanakan untuk tahun depan bisa direalisasikan sesuai dengan janji Dinas Dikbud kepada sekolah yang tak menerima bantuan pada tahun 2020. "Selama ini masih ada beberapa sekolah yang memang tidak layak huni lagi, jadi dengan adanya DAK itu dapat mengakomodir sekolah yang rusak," harap Holman.**(tek)**

Warga Positif Covid Dapat Bantuan Beras

RIO/RB

BANTUAN: Dinas Ketahanan Pangan BS menyalurkan bantuan beras ke warga yang terkena dampak pandemi Covid-19, Selasa (29/12).

KOTA MANNA - Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) hingga saat ini masih menjadi wilayah yang belum lepas dari sebaran pandemi Covid-19. Untuk meringankan beban warga yang terpapar Covid-19, Dinas Ketahanan Pangan BS akan mendistribusikan cadangan pangan berupa beras sebanyak 6 ton pada tahun 2021 mendatang.

Pembagian beras bantuan ini akan didistribusikan kepada pasien dan keluarga yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan berstatus isolasi mandiri. Sebab dengan jumlah stok beras sebanyak 6 ton yang dimiliki, tidak cukup apabila harus dibagikan secara merata untuk masyarakat Kabupaten BS. Sehingga Dinas Ketahanan Pangan BS menetapkan kriteria khusus untuk penerima bantuan beras tersebut yakni pasien Covid-19 dan keluarga, serta warga yang memang tidak mampu atau berstatus rawan pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan BS, Iskandar AZ menjelaskan saat ini ada 26 pasien Covid-19 beserta keluarga yang sudah menerima bantuan beras dengan rincian per kepala keluarga menerima 40 kg beras. "Tetap dengan kriteria khusus, tidak semuanya dapat. Karena terbatasnya jumlah beras tersebut," terang Iskandar.

Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga tak henti-hentinya mengingatkan agar warga di 11 kecamatan dan 158 desa/kelurahan bisa memanfaatkan lahan pekarangan sebagai kebun selama masa pendemi. Selain itu pemanfaatan kolam yang terbuat dari terpal juga sangat dianjurkan Dinas Ketahana Pangan.

"Setidaknya tidak lagi beli kebutuhan dapur kalau ada kebun di pekarangan, ditambah lagi kolam dari terpal. Contoh sudah banyak diajarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan," ujar Iskandar.**(tek)**

2020, BNN Nihil Tangkapan

Rehabilitasi 38 Pencandu Narkorba

KOTA MANNA– Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) merilis hasil kinerja selama tahun 2020, kemarin (29/12). BNN Kabupaten BS mengaku sepanjang tahun 2020 tidak ada tangkapan pelaku bandar maupun pengedar narkoba.

Hal itu disebabkan anggaran untuk operasi atau kegiatan BNN Kabupaten BS tidak ada. Kepala BNN Kabupaten BS AKBP. Ali Imron, SE mengatakan, sepanjang tahun 2020 pihaknya tidak mendapati atau menangkap pengedar narkoba. Tidak adanya anggaran menyulitkan pihaknya untuk bergerak.

Namun demikian diakui Ali, bukan berarti BNN Kabupaten BS tidak berkerja sama sekali. Namun hanya saja terbatas dan tidak bisa secara leluasa. Ali juga mengklaim BS terbilang aman, tidak terlalu mengkhawatirkan untuk peredaran narkoba. Akan tetapi kebanyakan masyarakat atau anak muda saat ini terpengaruh obat-obatan di warung-warung seperti lem, pil dan sejenisnya.

RIO/RB

RILIS: Kepala BNN Kabupaten BS AKBP. Ali Imron didampingi jajarannya menyampaikan rilis akhir tahun kinerja BNN, Selasa (29/12).

"Sepanjang tahun 2020 BNN Kabupaten BS tidak ada tangkapan narkoba. Ini juga dipengaruhi anggaran untuk BS tidak ada," ujar Ali.

Meski sepanjang tahun 2020 BNN Kabupaten BS tidak ada tangkapan, Ali menerangkan pihaknya telah merehab pemakai narkoba sebanyak 38 orang dari 20 orang yang ditargetkan.

Dari total rehab 38 orang tersebut, Ali menyebutkan kebanyakan pencandu sabu. Oleh sebab itu pihaknya akan rutin melakukan sosialisasi dampak narkoba ke masyarakat dengan program desa Bersinar di tahun 2021. "Ya untuk rehab kita over, artinya melebihi target dari sebelumnya hanya 20 orang," terangnya.**(tek)**

Awal Tahun, Tetapkan Tersangka Korupsi DD

KOTA MANNA - Rencana jaksa penyidik Pidsus Kejari BS menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Dana Desa Kuripan, Kecamatan Bunga Mas bulan Desember 2020, dipastikan tertunda. Saat ini tim penyidik masih mengumpulkan bukti lain. Kejari BS memastikan awal tahun 2021 baru akan ada penetapan tersangka.

Kasi Intel Kejari BS, M. Ichsan, MH mengatakan pihaknya saat ini telah mengantongi audit hasil penghitungan kerugian negara. Selain itu, ada bukti lain yang perlu dilengkapi untuk penetapan tersangka. "Untuk bulan Desember ini belum, masih tertunda. Kemungkinan awal tahun," terang Ichsan.

Dengan ditundanya penetapan tersangka kasus DD tersebut, maka calon tersangka masih dapat menikmati udara segar tahu baru nanti. Kendati demikian, Kejari BS memastikan kasus ini akan rampung tahun mendatang. "Tinggal melengkapi berkas lagi, semua akurat," jelas Ichsan.

Dari hasil penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat BS, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat dugaan penyelewengan DD Kuripan mencapai Rp 251 juta. Penyimpangan uang negara diduga dilakukan di beberapa item kegiatan, tapi yang lebih mendominasi adalah kegiatan fisik.

Pengusutan dugaan korupsi DD Kuripan telah bergulir sekitar empat tahun. Berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan penyimpangan anggaran pada beberapa item kegiatan tahun anggaran 2016 lalu.**(tek)**

Waspada Oknum Catut Nama Satgas Covid

KOTA MANNA - Wakil Bupati (Wabup) BS, H. Rifai Tajudin mengingatkan masyarakat untuk tidak asal percaya dengan oknum yang mengatasnamakan petugas kesehatan Covid-19. Oleh sebab itu, Wabup meminta semua Tim Satgas Penanganan Covid-19 bekerja sesuai tupoksi.

Hal ini disampaikan Wabup setelah beredarnya kabar di media sosial yang menyebutkan ada oknum petugas kesehatan Covid-19 mendatangi rumah warga di Kota Manna beberapa waktu lalu.

Wabup menyebutkan, Satgas Covid-19 tidak ada yang naik turun rumah warga untuk melakukan pendataan. Karena itu kalau bukan atas permintaan warga atau pihak pemerintah dan aparat jangan asal percaya dengan oknum tersebut.

"Tanya dulu identitasnya, Satgas Covid tidak ada yang naik turun rumah melakukan pendataan, jangan asal percaya," imbau Wabup melalui media sosialnya.

Selain itu Wabup memastikan Satgas Covid-19 BS berkerja secara tim dan memiliki laporan yang jelas. Oleh karenanya apabila ada tim yang lalai dalam melaksanakan tugas, Wabup minta masyarakat mengingatkan dan lapor. Dan, tidak memperkeruh suasana di tengah pandemi Covid-19.

Terpisah, Kapolres BS AKBP.Deddy Nata, S.IK melalui Kasubag Humas Iptu. Sarmadi juga mengingatkan masyarakat untuk tidak asal percaya dengan orang asing. Sekalipun itu orang yang datang mengatasnamakan petugas covid atau aparat.

Sarmadi menjelaskan, setiap petugas yang bekerja dilengkapi dengan identitas resmi. Sedangkan untuk aparat Polres BS, Sarmadi memastikan tidak ada yang asal datang ke rumah warga dan meminta data-data soal Covid-19.**(tek)**

IST/RB

LISTRIK: Sekda Kaur, Nandar Munadi saat memimpin rapat dan kegiatan pembagian listrik gratis.

86 Unit Rumah Warga Miskin Dapat Listrik Gratis

KOTA BINTUHAN – Pemkab Kaur secara bertahap terus memperhatikan warga miskin. Sudah banyak program untuk warga miskin di Kaur dilaksanakan oleh Bupati Kaur Gusril Fauzi dan Wakil Bupati Kaur Hj Yulis Suti Sutri. Mulai dari program bedah rumah baik itu bantuan pemerintah pusat, dana APBD dan Baznas.

Terbaru, bantuan listrik gratis untuk warga miskin di Kaur. Bantuan ini melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kaur.

Bantuan listrik gratis diberikan karena masih banyak warga miskin yang belum memiliki listrik di rumahnya. Sehingga dibantu pemasangan listrik secara gratis. Pembagian dan penyaluran listrik gratis ini dilaunching langsung oleh Sekda Kaur Nandar Munadi di ruang kerjanya, kemarin.

"Program listrik gratis melalui program dana CSR dari berbagai perusahaan. Hanya 86 unit rumah yang dapat kita bantu tahun ini. Tahun depan kita harapkan akan lebih banyak lagi perusahaan yang ikut andil dalam program ini. Kita sangat berterima kasih pada perusahaan yang ikut program ini," terang Nandar.

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Kaur, Drs. M Thabri mengakui tahun ini bantuan meteran dan pemasangan listrik gratis hanya 86 unit. Bantuan ini datang dari asosiasi pengusaha tambak udang di Kaur yang terdiri dari 32 perusahaan. Berhasil dikumpulkan sebanyak 64 unit meteran atau listrik gratis.

Selanjutnya, dari PT Bengkulu Sawit Lestari 1 unit, PT Anugerah Pelangi Sukses dan PT. Brantas Hidro Energi masing-masing 3 unit, PT Sahung Brantas Energy dan PT Bengkulu Mega Steel masing-masing 5 unit, Bank Bengkulu Cabang Bintuhan 2 unit dan PT Dinamika Selaras Jaya sebanyak 1 unit meteran dan pemasangan listrik gratis.

"Kita harapkan program CSR bantuan untuk pemasangan listrik gratis di Kaur tiap tahunnya bisa berjalan. Sehingga tahun ke depan tidak ada lagi di Kaur ini ada rumah yang tidak ada listrik. Kecuali rumah yang memang jauh dari tiang dan jaringan listrik," kata M. Thabri.(**cik**)

2021, 102 CPNS Mulai Bertugas

Januari 2021 Terima Gaji Pertama

KOTA BINTUHAN – Setelah menunggu beberapa bulan sejak dinyatakan lulus Oktober 2020 lalu, sebanyak 102 CPNS Kaur menerima SK kemarin (29/12). Kendati menerima SK tahun 2020, namun 102 CPNS Kaur baru aktif kerja awal tahun 2021.

Penyerahan SK langsung oleh Bupati Kaur Gusril Fauzi, S.Sos, M.AP bertempat di GSG Pemkab Kaur. Kegiatan penyerahan SK dilaksanakan sesuai protokol kesehatan Covid-19. Semua CPNS wajib memakai masker dan pengecekan suhu tubuh. Selain bupati juga hadir Kepala BKD dan PSDM, Arsal Adelin dan para kepala OPD lainnya di jajaran Pemkab Kaur.

Bupati mengingatkan para CPNS yang baru lulus untuk bersyukur karena telah berhasil lulus dan diangkat sebagai CPNS. CPNS baru yang akan mulai bekerja Januari 2021 harus menunjukkan kinerjanya dalam menjalankan tugas.

ALBERTUS/RB

SK CPNS: Bupati Kaur, Gusril Fauzi menyerahkan SK kepada 102 CPNS secara simbolis, Selasa (29/12).

"Selamat kalian semua saat ini telah diangkat menjadi CPNS di lingkungan Pemkab Kaur. Sebagai CPNS, saya berharap kalian bisa bekerja lebih semangat dan lebih giat lagi, agar bisa cepat diangkat menjadi PNS. Bekerjalah dengan baik dan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku, baik sebagai CPNS maupun sebagai PNS nantinya," pesan Bupati.

Terpisah, Arsal Adelin mengatakan 102 CPNS terdiri dari CPNS golongan II sebanyak dua orang, dan golongan III sebanyak 100 orang. Mereka terbagi tiga formasi yaitu formasi guru sebanyak 66 orang, formasi tenaga kesehatan 24 orang dan formasi tenaga teknis 12 orang.

Setelah menerima SK CPNS, para CPNS kemarin juga mendapat pembekalan langsung dari BKD dan PSDM Kaur. Mereka akan bertugas sesuai dengan formasi dan jurusan yang mereka lamar saat mendaftar sebagai CPNS tahun 2019 lalu.

"SK Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 Desember 2020. Namun mereka mulai bekerja dan terima gaji pada Januari 2021. Kita harapkan mereka semua bisa melalui masa-masa CPNS agar bisa diangkat menjadi PNS nantinya," ujar Arsal.(**cik**)

Tuntaskan Insentif Guru Gaji dan Pengurus Masjid

KOTA BINTUHAN – Akhir tahun 2020, Bagian Kesra Pemkab Kaur memastikan semua insentif guru ngaji dan pengurus masjid di Kabupaten Kaur dibayar hingga bulan Desember 2020. Termasuk pembayaran insentif pengurus Lembaga Adat Kaur (LaKu).

Hal ini disampaikan Kabag Kesra Pemkab Kaur, Robi Antomi kemarin. Program untuk insentif guru ngaji, pengurus masjid dan LaKu tahun 2020, ia pastikan tuntas 100 persen. Program ini akan berlanjut tahun 2021. Untuk tahun 2020, Pemkab Kaur menyiapkan anggaran sekitar Rp 4 miliar untuk pembayaran insentif tersebut.

"Dananya bersumber dari APBD. Program ini tetap akan berlanjut tahun 2021, namun untuk besaran insentif dipastikan belum akan ada kenaikan sementara waktu ini," terang Robi.

Selama ini, hampir setiap tahun pengurus masjid di Kaur mendapatkan insentif agar mereka terus memakmurkan masjid, baik itu masjid di kecamatan dan desa. Setiap pengurus masjid mendapatkan insentif yang besarannya berbeda-beda. Untuk Imam sebesar Rp 550 ribu, Khatib Rp 500 ribu, Bilal Rp 450 ribu dan Gharim Rp 425 ribu per bulannya untuk tingkat kecamatan.

Sementara untuk pengurus masjid di tingkat desa yakni Imam Rp 350 ribu, Khatib Rp 250 ribu, Bilal Rp 225 ribu, dan Gharim Rp 200 ribu. Sementara untuk guru ngaji yang jumlahnya 243 orang, setiap bulannya mendapat insentif Rp 500 ribu per bulan.

"Kita harapkan semua program pembinaan pengurus masjid dan guru ngaji ini akan terus berlanjut, karena sangat berdampak di tengah masyarakat. Masjid saat ini setiap magrib setidaknya aktif. Dan ini akan terus kita tingkatkan ke depannya bagaimana semua pengurus masjid di Kaur ini aktif setiap waktu salat di desanya masing-masing," jelas Robi.(**cik**)

SOSIALISASI HUKUM DESA GEDUNG SAKO 1

KECAMATAN KAUR SELATAN TAHUN 2020

Sosialisasi Hukum, Tetap Patuhi Prokes

KOTA BINTUHAN – Di tengah wabah Covid-19 yang saat ini terus meningkat, kegiatan sosialisasi hukum yang digelar oleh Desa Gedung Sako 1 di MTsN Bintuhan kemarin (29/12) tetap berjalan lancar. Kegiatan ini pun tetap mengacu pada protokol kesehatan Covid-19 yang disampaikan pemerintah agar terhindar dari virus corona.

Kepala Desa Gedung Sako 1, Kecamatan Kaur Selatan, Semi Seprizon mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih atas suksesnya pelaksanaan sosialisasi tersebut kepada masyarakat dan narasumber yang menyampaikan materi.

"Kegiatan ini memang kami persiapkan sebaik mungkin dan sengaja kami memakai aula MTsN ini supaya pelaksanaannya lebih baik. Dan juga sesuai dengan protokol kesehatan. Materi yang disampaikan tadi kita harapkan dapat diserap dengan baik oleh peserta yang terdiri dari perangkat desa, anggota BPD serta masyarakat," kata Semi Seprizon

Dalam kegiatan ini narasumber yang hadir di kegiatan ini di antaranya Sekretaris Inspektorat Kaur, Harles Feferman, Kasi Intelijen Kejari Kaur A. Guproni, SH, MM dan Bripka David Setiawan dari Polsek Kaur Selatan.

Sementara itu, tema yang diambil pada kegiatan sosialisasi hukum dan perlindungan masyarakat hari itu sama seperti tema yang juga dilaksanakan desa lainnya yaitu, "Meningkatkan Kemampuan Masyarakat dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Secara Mandiri Tanpa Melalui Jalur Pengadilan".

Melalui tema tersebut, Pjs Kades Gedung Sako I berharap dalam penyelesaian permasalahan harus melibatkan tiga pilar di desa yaitu Babinkamtibmas, Babinsa dan Kepala Desa.**(cik/krn)**

BERTUS/RB

LANCAR: Kegiatan sosialisasi hukum di Desa Gedung Sako 1 berjalan lancar dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Pembangunan Menggeliat, Butuh Sinergitas

TAHUN 2020 akan segera berakhir. Selama tahun 2020 ini, pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Provinsi Bengkulu sudah menunjukKan geliatnya. Mengalami perkembangan cukup baik. Misalnya sarana dan prasarana umum publik gedung pemerintahan, rumah ibadah, penataan kawasan obyek wisata maupun jalan dan jembatan.

Namun sarana dan prasarana bidang pertanian, seperti irigasi baru maupun irigasi lama yang juga perlu mendapatkan perhatian. Sektor perekonomian misalnya ekonomi kreatif, industri kecil dan industri rumah tangga masih butuh inovasi dan terobosan. Seperti disampaikan pengamat dari Fisip Universitas Bengkulu (Unib), Azhar Marwan.

"Untuk memuaskan semua pihak bukanlah sesuatu yang gampang. Dari sisi tahapan pembangunan kita lihat sudah menunjukkan track yang benar. Tinggal lagi konsep pembangunan kawasan, konektivitas antar provinsi tetangga yang sudah digagas penting untuk diwujudkan," kata Azhar.

Untuk mewujudkan itu, menurut Azhar penting sinergitas program antar provinsi dengan kabupaten/ kota hingga kepada penganggaran perlu juga ada kesamaan arah. Mewujudkan visi dan misi provinsi itu perlu dukungan dan komitmen bersama dengan seluruh kepala daerah, sebab wilayahnya ada dibawah pemerintahan kabupaten/ kota. Artinya harus ada kesamaan arah dan tujuan memajukan daerah ini ke depan.

Pemikiran untuk saling mendukung dan saling menunjang itu merupakan kunci sukses dalam membangun. "Jangan ada arogansi kekuasaan yang akan menghambat kemajuan daerah. Provinsi itu adalah provinsinya kabupaten/ kota demikian juga sebaliknya bahwasanya kabupaten/ kota itu juga miliknya provinsi," pungkasnya.(**key**)

---

8 Januari
Realisasi PBB
Realisasi PBB Rp 9,4 miliar. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Bengkulu capai 94 persen.

10 Januari
Rel Kereta Api
Pembangunan Rel Kereta Api Pulau Baai ke Kota Padang kembali dilanjutkan.

24 Januari
RB Terbaik
Harian Rakyat Bengkulu (RB) meraih penghargaan bergengsi dalam ajang The 11th Indonesia Print Media Award (IPMA) 2020. Penghargaan itu dalam Kategori Laporan Investigasi Surat Kabar Terbaik IPMA 2020, yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers (SPS).

26 Januari
Imlek
Etnis Tionghoa di Bengkulu merayakan Tahun baru Imlek melakukan doa bersama agar Provinsi Bengkulu dikaruniakan keamanan dan kebahagiaan.

10 Februari.
Rakornas Muhammadiyah
Majelis Pendidikan Kader Pimpinan Pusat (PP) Muhamadiyah sudah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) pada 6-9 Februari 2020 di Bengkulu.

19 Februari
UT Wisuda
Universitas Terbuka (UT) Bengkulu mewisuda 403 mahasiswa.

26 Februari
Pasar Bebas Premanisme
Kapolda Bengkulu mengatakan, ada kesepakatan antara Pemkot, Kepolisian dan TNI untuk memastikan pasar bebas preman.

2 Maret
Umrah Dihentikan Sementara
Arab Saudi untuk sementara waktu meniadakan pelaksanaan Umrah bagi warga negara luar, demi memutus mata rantai Covid-19.

20 Maret
Cuaca Buruk
Cuaca Buruk diperiode Minggu ketiga Maret membuat Nelayan di Kota Bengkulu setop melaut.

26 Maret
Virus Corona mulai merebak, harga Sembako terkerek naikt.

15 April
Bansos Bertambah
Provinsi Bengkulu mendapatkan tambahan 15.174 keluarga penerima manfaat program bantuan sosial sembako dari Dirjen Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI.

9 Mei
Heboh SE Data Ulang
Warga Kota Bengkulu heboh beredarnya surat edaran pendataan ulang penerima bantuan beras dan mie (Rasmi).

19 Mei
Gaji Dibayar
Gaji Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu selama 5 bulan akhirnya dibayar.

31 Mei
Bantuan Covid
Pemerintah Provinsi Bengkulu mengalokasikan anggaran untuk pernanganan Covid-19 juga termasuk untuk bantuan sosial (Bansos) sebesar Rp 15 miliar .

16 Juni
TPG Dipotong
Pemotongan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk zakat bagi di jajaran Dinas Pendidikan Kota Bengkulu diportes PGRI.

21 Juni
Belum Ada Izin
Pemprov Bengkulu mendapatakan izin dari Kemendagri dan KASN untuk menggelar mutasi dalam rangka pengisian kekosongan jabatan.

23 Juni
Menang Lomba
Pemkot Bengkulu sebagai pemenang pertama lomba vidio inovasi daerah tatanan normal baru produktif dan aman Covid-19 sektor transportasi umum.

25 Juli
Pemerintah Kota Bengkulu mendapatkan penghargaan predikat opini tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

4 Juli
Semua Harus Sekolah
Sejak ditutupnya penerimaan perserta didik baru (melalui jalur zona. Dispendik memastikan bahwa tidak ada anak yang tidak bersekolah.

29 Juli
Boleh Berjamaah Lagi
Memasuki era new normal kegiatan ibadah berjemaah kembali boleh dilakukan.

21 Juli
Bantuan Covid, Rp 80 Miliar
Untuk Penanganan Covid-19 Pemerintah Kota Bengkulu sudah membelanjakan anggaran hingga Rp 80 miliar.

1 Agustus
Idul Adha dengan Prokes
Hari Raya Idul Adha tahun ini dirayakan tetap mematuhi Prosedur Tetap (Protap) protokol kesehatan covid-19.

September
HUT RB ke 19
1 September
Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Bengkulu berdiri sejak 1 September 2001 menjadikan Koran RB pertama dan terbesar di Provinsi Bengkulu. Tahun ini 1 September 2020 usia RB tepat di angka 19 tahun,0.

10 September
Gubernur Beprestasi
Gubernur Bengkulu Dr. H. Rohidin Mersyah meraih penghargaan sebagai Pembina Olahraga Berprestasi tahun 2020.

30 September
Prestasi Bank Bengkulu
PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu bersaing dengan 110 bank umum se-Indonesia, Bank Bengkulu berhasil menyabet tiga penghargaan sekaligus.

2 Oktober
Sanksi Pelanggar Prokes
Pemberlakuan sanksi pelanggar protokol kesehatan. Mulai Kamis (1/10) sejak pergub dilaunching, bagi pelanggar protokol kesehatan.

9 Oktober
Demo DPRD
DPRD "Dikuasasi" Mahasiswa. Ribuan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

18 November
BPD jadi Bank Umum
PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu bersiap menjadi Bank Umum berdasaran Kegiatan Usaha (BUKU) II dengan modal inti Rp 1 triliun – Rp 5 triliun.

19 November
HUT Provinisi
Digelar rapat paripurna istimewa dalam rangka HUT ke-52 Provinsi Bengkulu di DPRD Provinsi Bengkulu, Rabu (18/11).

28 November
APBN Rp 14, 8 T
Provinsi Bengkulu diguyur APBN Rp 14,8 triliun. Terdiri dari belanja kementerian negara/lembaga sebesar Rp 4,6 triliun dan alokasi dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Rp 10,24 triliun.

12 Desember
Rombak Kabinet
Sejumlah wajah kepala daerah di Provinsi Bengkulu berubah. Diprediksi akan berdampak ke wajah para pejabat di birokrasi.

16 Desember
Angkat kematian pasien Covid-19 tembus 1.838 kasus.

18 Desember
Pemprov Bengkulu menargetkan seluruh proyek nasional di Bengkulu tuntas sebelum 2024.

22 Desember
Perda Pengendalian Covid
Pemprov Bengkulu bersama DPRD Provinsi membuat Peraturan Daerah dalam upaya mengendalikan penyebaran Covid-19 di Provinsi Bengkulu.

28 Desember
Jembatan Beroperasi
Hampir tiga tahun menunggu, jembatan di Desa Tanjung Aaung Kecamatan Tanjung Agung Paling (TAP) akhirnya bisa digunakan

Rakyat Bengkulu

METROPOLIS

RABU 30 DESEMBER | TAHUN 2020 | HALAMAN 9

Hujan, Diduga Tetap Dikerjakan

Proyek Hotmix Simpang Kandis

BENGKULU - Musim hujan di akhir tahun membuat pengerjaan sejumlah proyek dikebut. Seperti pengerjalan hotmix jalan Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya, Senin (28/12) lalu. Saat kontraktor mengerjakan proyek ini, turun hujan dengan derasnya. Aspal yang baru digelar tersiram hujan sehingga asap putih keluar dari hamparan aspal panas itu.

☞Baca ***HUJAN..*** Hal 15

ILHAM/RB

JALAN: Jalan di Taman Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya.

Waktu Semakin Mepet

BENGKULU – Di penghujung tahun 2020, masih ada beberapa proyek pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu yang belum selesai. Walaupun tinggal dua hari lagi, tutup buku, tepatnya Kamis lusa (31/12). Saat ini rekanan Dinas PUPR masih terus mengebut pekerjaannya.

☞Baca ***WAKTU..*** Hal 15

PROGRES PAKET PROYEK DINAS PUPR KOTA BENGKULU TA 2020

Bidang Cipta Karya

- Pembangunan Barendo Kota Bengkulu lanjutan APBD 2020 pagu Rp 13 miliar (selesai)
- Pembangunan Gedung Cybercrime Direskrimsus APBD 2020 pagu Rp 1,2 miliar (belum selesai)
- Pembangunan atau Rehabilitasi Gedung Pidum dan Pidsus Kejati Bengkulu APBD 2020 pagu Rp 3,3 miliar (belum selesai)

YUNIKE/RB

LANTIK: Asisten III Setdaprov Gotri Suyanto saat melantik dan mengambil sumpah pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Bengkulu, Selasa (29/12).

Peran Jafung Lebih Dominan

BENGKULU – Sebanyak 88 ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu dilantik dan diambil sumpah sebagai Pejabat Fungsional (Jafung) tertentu. Pelantikan dipimpin langsung oleh Asisten III Setdaprov Bengkulu Gotri Suyanto, di Gedung Pola Provinsi Bengkulu dengan diwakili 10 pejabat, dan yang lainnya mengikuti secara virtual, Selasa (29/12).

"Jabatan fungsional memiliki peran dan fungsi yang vital. Meskipun selama ini kurang mendapat perhatian, bahkan cenderung dipandang sebelah mata. Padahal fungsinya sangat diperlukan dalam melaksanakan kewajiban pokok organisasi dan secara fungsional," kata Gotri dalam sambutannya.

☞Baca ***PERAN..*** Hal 15

Beli Gas Subsidi Wajib Tunjuk Kartu Pelanggan

BENGKULU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu bersama PT Pertamina (Persero) Cabang Bengkulu melaunching kartu pelanggan gas elpiji 3 kilogram atau gas subsidi di salah satu pangkalan gas Kelurahan Kadang Mas, Selasa (29/12). Dengan kartu pelanggan ini dipastikan pendistribusian dan penggunaan gas elpiji 3 kilogram tepat sasaran, untuk masyarakat yang berhak menerimanya.

☞Baca ***BELI..*** Hal 15

Ist/RB

LAUNCHING: Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi bersama Sales Area Manajer PT Pertamina, Donny Brilianto melaunching kartu pelanggan di salah satu pangkalan Kelurahan Kandang Mas, Selasa (29/12).

2021, Pemkot Baru Bisa Usul Tes CPNS

BENGKULU – Tahun 2021 mendatang, Pemkot dipastikan tidak menggelar tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau calon Aparatur Sipil Negara (ASN). Lantaran tahun ini pemkot tidak mengusulkan formasi CPNS ke Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPanRB).

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bengkulu Muklis, mengatakan masa finalti penerimaan CPNS Pemkot Bengkulu berakhir tahun 2020. Sehingga tahun 2021 mendatang baru bisa mengusulkan formasi CPNS, untuk pelaksanaan seleksi di tahun 2022. "Usulan mulai kita lakukan 2021.

☞Baca ***2021..*** Hal 15

2021, Pemkot Baru Bisa Usul Tes CPNS

Sambungan dari hal 9

Yang pasti penerimaan (CPNS, red) tergantung anggaran yang tersedia dan komitmen pimpinan menyetujui," kata Muklis.

Sementara itu, jumlah PNS di Kota Bengkulu mulai dari tenaga kesehatan, guru, tenaga teknis dan lainnnya mencapai 4.803 pegawai. Sedangkan setiap tahun sekitar 200 PNS memasuki masa pensiun. Seperti tahun ini, ada 200 PNS yang memasuki pensiun dan mengusulkan untuk pensiun. begitu juga dengan tahun 2021 nanti, jumlah PNS yang pensiun juga berkisar 200 orang.

Dengan adanya 200 PNS yang pensiun setiap tahun, diproyeksikan lima tahun kedepan Pemkot kekurangan 7.000 PNS. Namun untuk memenuhi itu dibantu oleh tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT). "Kita tidak hanya mempertimbangan kebutuhan saja namun juga kita harus pertimbangkan anggaran," jelasnya.(**juu**)

Hujan, Diduga Tetap Dikerjakan

Sambungan dari hal 9

"Kalau mereka mulai kerja dari sore, memang sudah magrib hujan. Tetapi mereka tetap lanjut kerja. Kalau selesai (pengerjaannya) sepertinya sudah cukup malam. Karena saya menutup toko pukul 22.00 WIB mereka masih kerja sepanjang hujan," jelas karyawan toko sekitaran Simpang Kandis, Selvi Oktaviani.

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu Noprisman, ST, M.Si melalui Kabid Bina Marga Dian Fizayly, ST, MT memastikan di lokasi proyek jalan Simpang Kandis itu ada pengawas, ada pengendali dan ada konsultan. Jika hujan deras pasti dihentikan perkerjaannya.

"Mungkin kalau melihat yang masih berkerja menghabiskan sisa yang didete tetapi tetap kita cek suhu. Jika masih bisa dilaksanakan dan jika hujan deras akan dihentikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Bengkulu Indra Sukma mengatakan seharusnya pengawas ada di lokasi agar bisa mengontrol perkerjaan. Jika hujan, jangan sampai dipaksakan untuk diteruskan. Karena akan membuat jalan tersebut mudah rusak. (**juu**)

Riri: Percepat Pemberian Solusi atas Konflik Nelayan

BENGKULU- Api dalam sekam kembali membara. Istilah itu nampak dalam peristiwa pertikaian para nelayan Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal, terhadap masalah kapal trawl yang masih menangkap ikan di wilayah perairan Kabupaten Bengkulu Utara, baru-baru ini.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Hj Riri Damayanti John Latief mengharapkan kepada stakeholder terkait untuk segera memberikan solusi atas konflik tersebut agar api yang membara bisa diredam sampai padam.

"Konflik ini kan bukan sekali ini. Sudah pernah terjadi dan bukan hanya di satu tempat. Tak perlu mencari siapa yang salah. Mediasikan segera dan tuntaskan konflik ini hingga ke akarnya," kata Riri Damayanti kepada media.

Dewan Penasehat DPD Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Provinsi Bengkulu ini meminta kepada kementerian terkait untuk mengevaluasi keefektifan penggunaan anggaran yang selama ini ditunjukkan untuk nelayan.

"Kenapa program-program yang selama ini berjalan seakan tak mampu meredam konflik nelayan yang terjadi berkepanjangan? Apa yang salah? Ini harus jadi catatan khusus untuk Pak Sakti Wahyu Trenggono yang baru saja dilantik," ungkap Riri Damayanti.

Selain itu Wakil Bendahara III Ikatan Keluarga Seluma, Manna, Kaur ini menekankan pentingnya mencermati kembali kerumitan aturan-aturan yang terkait dengan kehidupan nelayan.

"Harus ada perlakuan yang adil terhadap seluruh nelayan. Kalau ada pihak-pihak yang mampu membuktikan aturan-aturan yang ada sekarang lebih banyak mengakomodasi kepentingan asing ketimbang nelayan kecil, saya minta rekan-rekan di parlemen mempersoalkan hal ini," ungkap Riri Damayanti.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini berharap agar model pembangunan kelautan ke depan harus benar-benar melibatkan nelayan tradisional beserta seluruh organisasinya.

"Jadi program-program yang dikucurkan pemerintah bisa sama-sama diawasi dan benar-benar terasa manfaat sehingga tidak ada lagi kecemburuan, kesalahpahaman atau segala sesuatu yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah-tengah nelayan," tandas Riri Damayanti.

Data terhimpun, konflik antar nelayan di Bengkulu Utara mendorong aksi nelayan dalam bentuk penutupan jalan lintas barat oleh masyarakat yang mengatasnamakan dari 4 desa yaitu Desa Serangai, Desa Palik, Desa Ketahun dan Desa Putri Hijau.

Konflik yang sama di kawasan tersebut pernah terjadi pada tahun 2019 lalu. Antar nelayan bahkan dilaporkan bentrok. Akibat konflik ini, ketegangan yang mencekam bukan hanya terjadi di perairan Laut Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, namun juga terjadi kawasan Pulau Baai Kota Bengkulu.

Bahkan pada bulan Juli 2020 yang lalu, konflik antara nelayan juga sempat berkobar di Desa Pasar Seluma ketika puluhan puluhan kapal trawl memasuki kawasan pesisir pantai Seluma.(**new/prw**)

RIRI DAMAYANTI

Beli Gas Subsidi Wajib Tunjuk Kartu Pelanggan

Sambungan dari hal 9

Sebab untuk membeli gas subsidi,masyarakat harus menunjukan kartu pelanggan pada pangkalan.

Sales Area Manajer PT Pertamina Lampung-Bengkulu Donny Brilianto mengatakan, mereka menyambut baik kerjasama yang telah dilaksanakan. Dengan terwujudnya pembagian kartu pelanggan gas elpiji 3 kilogram. Kartu pelanggan ada beberapa jenis, hijau untuk rumah tangga, kuning untuk UMKM dan merah untuk pengecer. "Dengan kartu pelanggan ini sehingga nanti pangkalan benar-benar bisa menginventarisir masing-masing klasifikasinya dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi kelangkaan lagi," jelasnya.

Sementara itu Wakil Walikota Bengkulu Dedy Wahyudi, SE, MM saat meyerah secara simbolis kartu pelanggan mengatakan seluruh yang sudah terdaftar, kemudian akan diklasifikasikan dan dibuat klaster. (**juu**)

Peran Jafung Lebih Dominan

Sambungan dari hal 9

Lanjut Gotri, jabatan fungsional ini dapat membantu mempermudah ASN dalam mengajukan kenaikan pangkat.

Sehingga tidak seharusnya ASN memandang jabatan ini dengan sebelah mata.

"Peran jabatan fungsional ini akan lebih penting dominan kedepannya, apalagi nanti ada pengurangan jabatan eselon III dan IV. Untuk pejabat yang baru dilantik semoga dapat amanah kedepannya," tegas Gotri.

Kepala BKD Provinsi Diah Irianti menambahkan, pejabat fungsional yang baru dilantik ini, meliputi 32 orang dari CPNS yang mengisi formasi tahun 2019, 35 orang melalui pengangkatan pertama dan 21 orang pengangkatan melalui penyesuaian atau inpassing. Terdiri dari auditor 1 orang, dokter 6 orang, apoteker 5 orang, guru 35 orang, psikolog 3 orang, fisioterapis 3 orang. Perawat 3 orang dan jabatan fungsional lainnya. (**key**)

Waktu Semakin Mepet

Sambungan dari hal 9

Dari pantau **RB**, sejumlah proyek pembangunan yang belum selesai adalah rehabilitasi atau peningkatan jalan paket 3 APBDP 2020 dengan pagu anggaran Rp 42,4 miliar, kemudian rehabilitasi atau peningkatan jalan paket 2 APBDP 2020 dengan pagu Rp 3,9 miliar. Selanjutnya pembangunan menara dan tempat wudu Masjid At-taqwa yang bersumber dari APBDP dengan pagu Rp 11,9 miliar, peningkatan atau rehab Balai Adat bersumber dari APBD 2020 dengan pagu Rp 1,8 miliar. Serta sejumlah proyek pembangunan gedung lainnya.

Untuk proyek pembangunan gedung yang belum selesai ini, di lapangan masih banyak tukang beraktivitas menyelesaikan pekerjaannya. Begitu juga dengan proyek jalan yang belum selesai, masih terlihat aktivitas pengaspalan yang masih terus berlanjut.

Dikonfirmasi Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Kota Bengkulu, Maas Sabirin menegaskan seluruh proyek pembangunan gedung yang dikerjakan telah selesai semuanya.

"Banyak yang sudah selesai. Ya gedung itu semuanya sudah selesai," kilah Maas Sabarin.

Selain itu, pengerjaan proyek pembangunan jalan yang dikerjakan menggunakan APBD 2020 semuanya sudah selesai September lalu. Untuk proyek pembangunan jalan yang dikerjakan menggunakan APBD Perubahan 2020 tinggal beberapa lagi yang belum selesai. Seluruhnya adalah jalan lingkungan.

"Sebagian masih mengerjar progres sampai akhir tahun seperti paket 2 dan 3 karena jalan lingkungan cukup banyak. Tapi kita kerjakan sampai 31 Desember progres 100 persen," jelas Kabid Bian Marga Dian Fizayly.

Dikatakannya, untuk proyek pembangunan jalan di APBD Perubahan yang sudah selesai diantaranya Jalan Belimbing dan Jalan Dharma Wanita. (**juu**)

PROGRES PAKET PROYEK DINAS PUPR KOTA BENGKULU TA 2020

Bidang Cipta Karya
- Pembangunan Gudang Kantor BPKAD Kota Bengkulu APBD 2020 pagu Rp 400 juta (selesai)
- Pembangunan Gedung fraksi Lanjutan APBD 2020 pagu Rp 3,5 miliar (selesai)
- Pembangunan Gedung Proyek Strategis Kejari Bengkulu APBD 2020 pagu Rp 2,9 miliar (belum selesai)
- Peningkatan atau Rehab Balai Adat APBD 2020 pagu Rp 1,8 miliar (belum selesai)
- Rehabilitasi Gedung Pelayanan Publik Polres Kota Bengkulu APBD 2020 pagu Rp 8 miliar (belum selesai)
- Pembangunan Menara dan Tempat Wudu Masjid At-taqwa APBDP pagu Rp 11,9 miliar (belum selesai)
- Pembangunan sarana dan prasarana korem 041 Bengkulu APBDP 2020 Rp pagu Rp 1 miliar (belum selesai)
- Pembangunan Septictank APBD 2020 pagu Rp 1,5 milliar (Batal)
- Pembangunan Bumi Perkemahan APBD 2020 pagu Rp 500 miliar (Batal)
- Peningkatan Rehab Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Kota Bengkulu APBD 2020 pagu Rp 800 juta (Batal)

Bidang Bina Marga
- Penigkatan dan pelebaran Jalan Padang Serai APBD 2020 (DAU) pagu Rp 14,7 miliar (selesai)
- Peningkatan Jalan Bangka APBD 2020 pagu Rp 4 miliar (selesai)
- Peningkatan Jalan Sumas APBD 2020 pagu Rp 7,5 miliar (selesai)
- Rehabilitasi atau peningkatan jalan Paket 1 APBDP 2020 pagu Rp 50 miliar belum (selesai)
- Rehabilitasi atau Peningkatan Jalan Paket 2 APBDP 2020 pagu Rp 3,9 miliar (belum selesai)
- Rehabilitasi atau peningkatan Jalan Paket 3 APBDP 2020 pagu Rp 42,4 miliar (belum selesai)
- Penigkatan Jalan Belimbing APBDP 2020 pagu Rp 4,5 milliar (selesai)
- Jalan Bhakti Dharma Wanita APBDP 2020 pagu Rp 5 miliar (selesai)
- Peningkatan Jalan Enggano Rp 17 miliar (batal)
- Perkantoran APBDP 2020 pagu Rp 1,5 miliar (batal)
- Jalan Dempo Raya APBDP 2020 pagu Rp 8 milliar (batal)

Bidang Sumber Daya Air
- Rehabilitasi jaringan iriigasi di air Tebat Besar (DAK) APBD 2020 pagu Rp 3 miliar (selesai)
- Penataan Tepi Sungai Kota Tua APBD 2020 pagu Rp 6 miliar (selesai)
- Peningkatan atau Rehabilitasi Drainase Jl. M Ali Amin Rt 35 Pematang Gubernur APBD 2020 pagu Rp 749 juta (selesai)
- Peningkatan atau Rehabilitasi Drainase Mahakam belakang Perum Rafflesia APBD 2020 pagu Rp 500 juta (selesai)
- Peningkatan Rehabilitasi Drainase jalan danau tembus pintu air APBD 2020 pagu Rp 500 miliar (selesai)
- Peningkatan Rehabilitasi Drainase Puri Mas 1 menuju kantor DPRD APBD2020 pagu Rp 500 juta (selesai)

TIRTA DHARMA
LAYANAN SMS
PDAM
KOTA BENGKULU
Menghimbau pelanggan PDAM Kota Bengkulu membayar tagihan sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari sanksi hingga pemutusan.
Menghimbau melakukan pembayaran pada LOKET RESMI untuk menghindari penipuan.
UNTUK KELUHAN LAYANAN (HANYA SMS)
Mohon SMS kan ke 0821 8613 4569 sbb:
a. Nama /No.SL Pelanggan
b. Alamat lengkap dan nomor Hp
c. Laporan /keluhan
Mohon informasi ini disampaikan kepada pelanggan yang lain
"Kepuasan Pelanggan Komitmen Kami"

Pimpin PKS Kota, Rahmad Widodo Targetkan PKS Menang 2024

BENGKULU - Pucuk pimpinan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bengkulu resmi berganti. Senin (28/12), Rahmad Widodo, S.Hut terpilih sebagai ketua dalam Musda serentak yang digelar se Indonesia. Alumni Kehutanan Universitas Bengkulu tersebut menargetkan kemenangan PKS dalam Pileg 2024 mendatang.

"Meraih 20 persen atau 8 kursi di DPRD Kota," kata Rahmad.

Penguatan atau konsolidasi internal kader dan struktur juga menjadi fokus perhatiannya. "Selain itu juga ingin mewujudkan PKS sebagai partai Islam rohmatal lil'alamin yang semakin kokoh bersama memberikan pelayanan kepada ummat bangsa, dan negara. Dengan membawa semangat dan kebersamaan dari para kader inilah insya Allah target itu semua bisa tercapai," imbuhnya.

Diakui Rahmad, menjadi seorang pemimpin merupakan amanah yang sangat berat. Pasalnya harus dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. "Karena itu kita dilarang meminta amanah. Namun tatkala amanah itu diberikan kita harus siap menjalankan semaksimal mungkin," pungkasnya.

Masa jabatan kepimpinan Rahmad akan berlangsung hingga 5 tahun ke depan. Dari musyawarah Pemira Kader Kota Bengkulu juga dibahas kepengurusan Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) PKS Kota Bengkulu. Meliputi Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) Ustad H. Tusman Hayadi, S. Pd. didampingi Irman Sawiran, SE sebagai Sekretaris.

Sedangkan, untuk Sekretaris DPD dipegang oleh Andi Saputra, S. Pd, dengan Bendahara Sarbini, SE. Untuk Kaderisasi oleh Ahmadi Lubis dan MPD Ketua Dewan Etik Daerah meliputi H. M. Zaini, S. P. d dan Sekretaris Rusli Supriatna, S. Pd.(**adn/rls/krn**)

RAHMAD WIDODO

PERKEMBANGAN HARGA BAHAN PANGAN POKOK PASAR TRADISIONAL PROVINSI BENGKULU

Surya Ofiana, SE, M.Si
Pit Kadis Perindag Provinsi Bengkulu

	KOMODITI		SATUAN	HARGA (RP.)	KETERANGAN
1	BERAS	- IR 64 (Lokal Lampung)	kg	10.000	
		- IR 64 (Lokal Bengkulu)	kg	10.000	
		- Manggis Manis (Premium)	kg	12.500	
		- Kembang Kol (Premium)	kg	11.500	
		- Termurah	kg	9.375	
		- Cap Bulog/ Dolog	kg	9.375	
2	GULA PASIR	- DN	kg	12.500	
3	MINYAK GORENG	- Bimoli Kemasan	1 liter	15.000	
		- Tanpa Merk	1 liter	12.150	
4	DAGING	- Sapi Lokal Paha Belakang	kg	120.000	
		- Sapi Lokal Paha Depan	kg	120.000	
		- Sandung Lamur	kg	80.000	
		- Tetelan	kg	60.000	
		- Has Luar	kg	120.000	
		- Has Dalam	kg	120.000	
		- Daging Ayam Broiler	kg	34.000	Turun
		- Daging Ayam Kampung	kg	65.000	
5	TELUR	- Telur Ayam Broiler	kg	25.000	Naik
		- Telur Ayam Kampung	kg	52.500	
6	Cabe Merah Keriting		kg	42.000	
	Cabe Rawit Hijau		kg	25.000	
7	Bawang	- Merah	kg	35.000	
		- Putih	kg	26.000	
8	Susu Kental Manis	- Bendera	370 gr	11.000	
		- Indomilk	370 gr	10.000	
9	Garam	Beryodium Halus	kg	13.000	
10	Kacang	- Kedelai Eks Impor	kg	8.600	
		- Tanah	kg	25.000	
		- Hijau	kg	23.000	
12	Mie Instan	- Kari Ayam	bks	3.000	
13	Ikan	- Asin Teri	kg	60.000	
		- Kembung	kg	35.000	
		- Segar Tongkol/ Tuna	kg	25.000	
14	Ketela Pohon		kg	4.000	
15	Jagung Pipilan Kering		kg	7.000	

PERKEMBANGAN HARGA BARANG STRATEGIS KOTA BENGKULU

	KOMODITI	HARGA (RP.)	KETERANGAN
1	Semen 3 Roda	57.000	
2	Semen Holcim	57.000	
3	Semen Merah Putih	55.000	
4	Semen Padang	58.000	
5	Besi Beton 6 mm	30.000	
6	Besi Beton 8 mm	45.000	
7	Besi Beton 10 mm	67.000	
8	Besi Beton 12 mm	97.000	
9	Triplek 6 mm	95.000	
10	Kayu Balok 7/14 Bawang	100.000	
11	Kayu Balok 3/25 Bawang	100.000	
12	Paku 2 cm (1 inch)	20.000	
13	Paku 3 cm (1 1/2 inch)	20.000	
14	Paku 4 cm (2 inch)	17.000	
15	Paku 5 cm (2 1/2 inch)	17.000	
16	Paku 7 cm (3 inch)	17.000	
17	Paku 10 cm (4 inch)	17.000	
18	Pupuk KCL	7.000	
19	Pupuk NPK (Mutiara)	10.000	
20	Pupuk SP36	2.000	
21	Pupuk Urea	7.000	
22	Pupuk ZA	1.400	
23	Gas LPG 3 KG	18.000	
24	Baja Ringan	91.000	

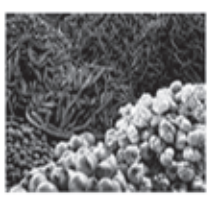

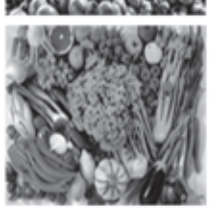

Sumber : Pantauan Pasar Minggu, Pasar Panorama dan Pasar Barukoto

إنا لله وإنا إليه راجعون
Rakyat Bengkulu RB
Keluarga Besar Harian Rakyat Bengkulu
Pilihan Utama
Mengucapkan Duka Cita yang Mendalam Atas Wafatnya
Soneta Ardiyati binti Syudirman Syarif,
istri dari Oswardi Ardiansyah
Karyawan Harian Rakyat Bengkulu
Lahir 8 Desember 1980 – Wafat 29 Desember 2020
dikebumikan di TPU Rawa Makmur Kota Bengkulu
Semoga almarhumah husnul khotimah, mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan diberi ketabahan untuk keluarga yang ditinggalkan
General Manager
Marsal Abadi, SE

bank bengkulu
tangguh dan tumbuh
Kantor Pusat :
Jl. Basuki Rahmat No.6 Telp. 21503, 21751, 22144 Bengkulu

TABUNGAN

NAMA BANK	JENIS	SALDO	BUNGA/TH	KRITERIA
Bank Bengkulu	Tabot		1,00%	
	Simpeda	Rp. 0 s.d Rp. 500 Rb	0,50%	
		> Rp. 500Rb s.d Rp. 5 Jt	1,00%	
		> Rp. 5 Jt s.d Rp. 50 Jt	1,25%	
		> Rp. 50 Jt s.d Rp. 500 Jt	1,50%	
		> Rp. 500 Jt	2,00%	
	Tabunganku	Rp. 0 s.d Rp. 500 Rb	0%	
		> Rp. 500Rb s.d Rp. 1 Jt	0,25%	
		> Rp. 1Jt	1,00%	

DEPOSITO

NAMA BANK	1 BLN	3 BLN	6 BLN	12 BLN
Bank Bengkulu	5%	5%	5,25%	5,25%

Pembina Manajemen: DAHLAN ISKAN **Pemimpin Umum**: HM.MUSLIMIN (nonaktif), **General Manager/Penanggung Jawab**: MARSAL ABADI, **Wakil Pemimpin Umum/Manajer Personalia**: MUTIA AMPERIANA, **Pemimpin Perusahaan**: Hj. NURBAITI, **Wakil Pemimpin Perusahaan**: -, **Pemimpin Redaksi**: RIKY DWI PUTRA, **Redaktur Pelaksana**: PATRIS MUWARDI, **Redaktur**: SUMARLIN, HERI APRIZAL, FAZLUR RAHMAN, ADE HARYANTO **Wartawan Kota**: ANUGERAH WAHYU, IKSAN AGUS ABRAHAM, HASRUL, YUNIKE KAROLINA, WINDI JUNIUS, JIAFNI RISMAWARNI, ILHAM JULIANDI, **Wartawan di Daerah**: PERI HARYADI (Mukomuko), ARIE SAPUTRA WIJAYA (Kepahiang), M. RIZKI WAHYUDI (Seluma), ALBERTUS YUDI PRATAMA (Kaur), RIO AGUSTIAN (Bengkulu Selatan), TRI SHANDY RAMADANI (Bengkulu Utara), MUHARISTA DELDA (Lebong), WANDA FEBRIANDA (Rejang Lebong), JERI YASPRIANTO (Bengkulu Tengah), **Sekretaris Redaksi**: ANNA MARIYOHANA. **Pracetak**: SUTAMRIN (Kabag), FRAN SINATRA, ARI WIDARYANTO, HENDRA IRAWAN PUTRA, REFDIANTO, HEFFY JUNAIDI, **Teknologi Informasi (TI)**: ZULHAMDI, RUSDIYANTO **Manajer Iklan**: KOMI KENDY, **Account Executive (AE)**: WILMAN SITUMORANG, M. IRFANSYAH, DEVI ASTIKA, ADAM MALIK, RIKO PUTRA, AMALUDIN HAKIM, **Koordinator Penagihan Piutang Iklan dan Koran**: MARSAL ABADI, **Staf**: RIZKI NOVA AMELIA, FRANKY, HELEN, INDI SUDARTO, **Design iklan**: BOY RAHMAN HAKIM, VORWANTO, **Manajer Pemasaran**: HAZRIM, **Deputi**: MASRIYADI, **Staf Pemasaran**: SULISTI HARTINI, SIRHANUDIN, SAMRISMAN LUBIS, OZWARDI ARDIANSYAH, RUDI HARTONO, JULIMAN HAIDI. **Manajer Keuangan**: Hj. NURBAITI, **Deputi Manajer Keuangan**: AGUS SUWARSONO, **Accounting**: ELYA, SULUNG ERNAWATI, LUSIATI, **Event Organizer (EO)**: TUSDA ADHAM, BETTY HERLINA, **Divisi Anak Perusahaan**: SUKATNO, M FIRDAUS, JEFRI GINTING, M RASUL, SOPYAN ARDI, SUMANTRI, WARSIMAN, ERWIN ABENDI, HERU PP, MARSAL ABADI, DASPAN HARYADI, BAHMAN HADI, KARTUBI, M BASIR, WIRO IDRUS SALAM, NANANG SETIAWAN, DITA ASFANI, SUSANTO, PURNAMA SAKTI, SYAHBANDAR, AZMALIAR ZAROS, ARJUNA WIWAHA. **Penerbit**: PT BENGKULU SEMARAK PERMAI, **Komisaris Utama**: HM ALWI HAMMU, **Komisaris**: DWI NURMAWAN, LUKMAN SETIAWAN. **Direktur Utama**: H SUPARNO WONOKROMO. **Direktur**: HM. MUSLIMIN, MH, **Coorporate Lawyer Jawa Pos Group/Harian Rakyat Bengkulu**: Dr. Harris Arthur Hedar, SH, MH, **Alamat Redaksi/Pemasaran/Iklan**: Graha Pena Rakyat Bengkulu Jalan P Natadirdja No. 69 KM 6,5 Bengkulu. **Telepon** (0736) 20882, 22060, 341694, 344754, 346771 **Faximile** (0736) 346770 **Perwakilan Jakarta**: Graha Pena Jakarta Lantai 6 JalanRaya Kebayoran Lama No. 16 Jakarta. (021)-53699581 **Fax** (021) 53651427 **Percetakan**: PT BENGKULU SINAR GRAFIKA, **Manajer Percetakan**: - , **Operasional Percetakan**: JOKO SANTOSO, MAWARDI, ARI YULIZAR, MESTA DOMIZA, HERMAN, TRIONO WIJAYA, MARSUDI, MEDI PURWANTO, APRIANDONI, HENDRI SAPUTRA, AGUNG SYAPUTRA, SAIWAN, **Alamat Percetakan**: Jalan WR Supratman RT 01 Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, Telepon 082180191842.**Tarif Iklan**: Display (umum) Rp.47.500/mmk, sosial/keluarga/pendidikan, film, dan ucapan selamat Rp 25.000/mmk, iklan baris/mini Rp 5.500/baris (min 3 baris, max 10 baris). Warna (minimal 1/4halaman) Rp 48.000/mmk satu warna, Rp 53.000/mmk (2 warna), dan Rp.62.500/mmk (full colour). Harga eceran Rp 6.000/eks, langganan Rp 165.000, luar kota tambah ongkos kirim.
- Wartawan Rakyat Bengkulu dilarang menerima uang maupun barang dari sumber berita - Wartawan Rakyat Bengkulu dalam menjalankan tugas dibekali kartu identitas. - Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Dewan Minta BKD Siapkan PBB Online

PELABAI - Anggota DPRD Kabupaten Lebong, Sriwijaya, SH meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) benar-benar menyiapkan rencana pelayanan online. Khusus untuk pembayaran Pajak Bumi Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2).

Jika memungkinkan, pelayanan PBB-P2 secara online sudah diterapkan 2021. ''Ini untuk menyikapi kebiasaan realisasi PBB-P2 yang tidak pernah capai target," kata Sriwijaya.

Tidak dipungkiri, dengan pembayaran PBB-P2 secara online, Pemkab bisa lebih mudah melakukan pengawasan. Khususnya dalam meminimalisir potensi penggelapan setoran dari wajib pajak oleh pihak desa atau kelurahan. Selain itu, setiap wajib pajak juga bisa lebih mudah melacak PBB-P2 yang dibayarkannya melalui pihak desa dan kelurahan telah disetorkan atau tidak. ''Yang penting teknis pembayarannya mudah mengingat tidak semua masyarakat di Lebong melek teknologi," tutur Sriwijaya.

Terpisah, Kabid Pendapatan dan Bagi Hasil BKD Kabupaten Lebong, Rudi Hartono, SE, M.Ak mengatakan, rencana pembayaran PBB-P2 secara online menindaklanjuti tingginya tunggakan PBB-P2 di Kabupaten Lebong. Bahkan realisasi untuk tahun ini, baru 60 persen. Dan bila dikalkulasikan sejak 2016, piutang PBB-P2 yang belum tertagih mencapai Rp 2 miliar. ''Kalau disetujui akan kami matangkan persiapannya. Sehingga tahun 2021 bisa diterapkan," ujar Rudi.

Salah satu persiapan yang telah dilakukan BKD, menjalin kerja sama dengan Bank Bengkulu. Bahkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan pihak bank untuk sejumlah pelayanan pembayaran secara online telah dilakukan sejak 2014. Bentuk pelayanan yang diberikan, masyarakat tidak hanya bisa melakukan pembayaran PBB-P2 melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Juga akan diaplikasikan ke perangkat smartphone. ''Dengan demikian pembayaran PBB-P2 juga bisa dilakukan melalui mobile banking," demikian Rudi.(**sca**)

Kakek Membusuk Karena Sakit

LEBONG TENGAH - Hasil penyelidikan yang dilakukan Polsek Lebong Tengah, kematian Sandiharjo (87), warga Desa Semelako III, Kecamatan Lebong Tengah disimpulkan bukan karena dibunuh. Pria uzur yang saat ditemukan sudah membusuk itu dipastikan meninggal karena sakit.

''Tidak ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban berdasarkan visum dokter," kata Kapolres Lebong, AKBP. Ichsan Nur, S.IK melalui Kapolsek Lebong Tengah, Iptu. Kuat Santosa, SH.

Begitupun hasil olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan keterangan saksi, tidak ditemukan bukti yang mengarah korban dibunuh. Tidak ada satupun saksi yang melihat kematian korban. Hanya beberapa warga sempat melihat korban berjalan kaki di seputaran desa sebelum ia ditemukan sudah menjadi mayat. ''Korban diketahui mengidap pikun sehingga diyakini tidak ingat jalan pulang ke rumahnya," terang Kuat.

Dalam kondisi tersesat itulah, diyakini korban mengalami dehidrasi karena lapar dan kedinginan. Identitas korban diketahui setelah menantunya, Sanul (75), warga Desa Semelako III mengenali celana yang sempat ditemukan di sebelah jasad korban. ''Korban sebenarnya warga Desa Jajaran Baru, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Tetapi sejak empat bulan ikut anaknya menetap di Lebong," jelas Kuat.

Lebih lanjut Kuat mengatakan, korban meninggalkan rumah sejak Sabtu (12/12). Oleh keluarganya sempat dilaporkan ke perangkat desa dan dilakukan pencarian. Namun upaya pencarian tidak membuahkan hasil hingga akhirnya Selasa (22/12), korban ditemukan sudah tidak bernyawa oleh 3 pemuda yang mencari tunas bambu atau rebung.**(sca)**

ARIS/RB

GEMBIRA : Para CPNS formasi 2019 menerima SK penugasan, kemarin (28/12).

Februari, 98 CPNS Mulai Terima Gaji

PELABAI - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil perekrutan formasi 2019 akan menerima gaji perdana di Februari 2021. Itu sesuai Terhitung Masa Tugas (TMT) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong mulai 4 Januari 2021.

''Atas TMT itu, artinya CPNS akan terima gajinya Februari," ujar Kabid Pengadaan Pegawai Mutasi dan Informasi BKPSDM Lebong, Apedo Irman Bangsawan, SH.

Gaji yang akan dibayarkan kepada 98 CPNS itu masih 80 persen dari total gaji yang akan diterima masing-masing CPNS berdasarkan golongan. Gaji 100 persen baru akan dibayarkan setelah CPNS selesai menjalani prajabatan dan dikukuhnya sebagai PNS. ''Mudah-mudahan seluruh CPNS ini nantinya diangkat jadi PNS," terang Apedo.

Para CPNS yang telah menerima Surat Keputusan (SK) tugas, diminta segera melapor ke masing-masing atasan tempatnya ditugaskan. Selanjutnya setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta segera membuat surat keterangan bahwa CPNS bersangkutan sudah mulai melaksanakan tugas. ''Itulah dasar pembayaan gaji CPNS," jelas Apedo.

Dijelaskannya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 pihaknya mengusulkan dana Rp 900 juta. Dana itu untuk diklat prajabatan CPNS. Wajib dilaksanakan setiap CPNS yang akan diangkat menjadi PNS.

''Tujuannya untuk memberikan pengetahuan serta pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS," ungkap Apedo.

Pantauan RB, kemarin (29/12) BKPSDM telah membagikan SK kepada CPNS. Namun karena pandemi Covid-19, pembagian SK baru diserahkan kepada 49 CPNS. Separuhnya lagi dijadwalkan akan menerima SK hari ini.**(sca)**

ARIS/RB

BAHAYA: Kebiasaan sebagian warga membuang sampah sembarangan beresiko memicu banjir.

Curah Hujan Tinggi, Waspada Banjir

PELABAI – Curah hujan yang belakangan ini kembali meningkat di wilayah Lebong, berpotensi memicu bencana. Baik longsor maupun banjir. Warga yang tinggal di sekitaran bantaran sungai, yakni Sungai Ketahun, Sungai Kotok dan Sungai Uram diimbau tetap siaga.

''Biasanya kalau turun hujan berhari-hari, volume air di tiga sungai itu meningkat drastis sehingga dapat memicu banjir," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong, Fakhrurrozi, S.Sos, M.Si.

Diakuinya, BPBD tetap menyiagakan petugas memantau kondisi sungai yang ada di Lebong. Termasuk memantau jalur lintas Lebong-Bengkulu Utara dan Rimbo Pengadang-Topos. Khususnya jalur Lebong-Rejang Lebong yang rawan bencana longsor.

''Jika sedang hujan deras, kami harap masyarakat yang melintas di jalur Lebong Selatan-Rimbo Pengadang meningkatkan kewaspadaan," papar Fakhrurrozi.

Di sisi lain, ia mengajak masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan sungai. Jangan sampai ada masyarakat yang membuang sampah ke sungai agar aliran sungai tidak tersumbat. Diharapnya seluruh perangkat kecamatan, kelurahan dan desa proaktif sosialisasi ke masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

''Drainase yang ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat juga harus dibersihkan supaya tidak ada saluran yang tersumbat," tukas Fakhrurrozi.

Sementara Bupati Lebong, Dr. Rosjonsyah, M.Si mengingatkan masyarakat tidak menggunduli hutan. Sejumlah bencana yang terjadi di Lebong, diyakininya tidak lepas dari aktivitas penebangan hutan. Baik pembukaan lahan kebun oleh warga maupun kesengajaan pelaku *illegal logging*. ''Bagaimana air hujan dapat terserap dengan baik kalau hutan yang ada di sekeliling Lebong digunduli," pungkasnya.**(sca)**

2021, Seluruh Desa Wajib Punya BUMDes

PELABAI - Bupati Lebong, Dr. H. Rosjonsyah, S.IP, M.Si meminta seluruh desa di Kabupaten Lebong mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jika masih ada desa yang belum juga dirikan BUMDes, dimintanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMDS) tidak merekomendasi pencairan dana mandiri desa yang bersumber dari APBD, yakni Alokasi Dana Desa (ADD). ''Pendirian BUMDes itu sudah diinstruksikan sejak digulirkannya program DD (dana desa, red) sejak tahun 2015," kata Bupati.

Diakuinya, pembentukan BUMDes merupakan salah satu program prioritas dalam pemanfaatan DD. Dalam program DD ada 4 program yang harus diprioritaskan dalam pemanfaatannya. Antara lain pembentukan Embung Desa, BUMDes, Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prokades) dan sarana olahraga desa.

''Tugas PMDS, salah satunya mendorong agar seluruh desa di Kabupaten Lebong segera membentuk BUMDes dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing desa," tutur Bupati.

Pembentukan BUMDes ditujukan untuk memperkuat perekonomian desa karena dari BUMDes itulah Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat dikelola dengan maksimal. Pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. ''Itu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menciptakan desa mandiri yang mampu mendapatkan PADes," papar Bupati.

Sementara Kepala Dinas PMDS Kabupaten Lebong, Reko Hariyanto, S.Sos, M.Si mengatakan dari 93 desa di Lebong tinggal 2 desa yang belum mendirikan BUMDes. Dua desa itu, Desa Bioa Putiak dan Desa Ketenong I, Kecamatan Pinang Belapis. ''Bahkan dari desa yang sudah mendirikan BUMDes, baru dua puluh desa yang menyertakan modalnya ke BUMDes," tandas Reko.

Dijelaskannya, pendirian BUMDes harus didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa. Itu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menciptakan desa mandiri yang mampu mendapatkan PADes.(**sca**)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU FAKULTAS PERTANIAN PROGRAM
PASCASARJANA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
Jalan Raya Kandang Limun Bengkulu, Telpon : 0736-7009070,21170 Pesawat 206,226
Faksimile 0736-21290 Kode Pos 38371.A

PENERIMAAN MAHASISWA BARU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 SEMESTER GENAP
AKREDITASI B

Program Pascasarjana (S2) Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA) Universitas Bengkulu, menerima mahasiswa baru semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Persyaratan :
- Lulus S1 Semua Disiplin Ilmu
- Mengisi Formulir Pendaftaran Dengan Melampirkan
  - Foto Copy Ijazah S1 dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir
  - Pas foto berwarna berukuran 4x6, 3x4, 2x3 masing-masing 3 lembar
- Membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 500.000,-

Waktu Pendaftaran :
02 November 2020-23 Januari 2021

Pendaftaran dan Informasi :
Sekretariat Program Pascasarjana Pengelolaan Sumber Daya Alam
Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu,
Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu

Contact Person:
Dr. Ir. Bieng Brata, MP (081271649050), Ratih Putri Karlia, SE (0811727688)
Dewa GS, S.Hut (082307263380)

Dr. Ir. Bieng Brata, MP
Ketua Program

Dr. Ir. Dwi Wahyuni Ganefianti, MS
Dekan Fakultas Pertanian

Diduga TPP Tidak Dibayar, Kantor Sepi

MUKOMUKO - Aktivitas ASN di perkantoran Pemkab Mukomuko di penghujung tahun, terlihat sepi. Disinyalir, ini disebabkan informasi bakal tak dibayarnya Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) oleh Pemkab. Yakni TPP untuk bulan November dan Desember 2020. Hal ini membuat pegawai khususnya PNS tak lagi bersemangat ke kantor.

Kabag Organisasi Setdakab Mukomuko, Drs. Yan Daryat mengakui aktivitas di kantor saat ini sepi dari biasanya. Namun ia membantah kalau ini terjadi sebagai reaksi ASN terhadap bakal terutangnya pembayaran TPP dua bulan terakhir. Meskipun ia sendiri belum dapat memastikan, apa yang menyebabkan mulai terlihat sepinya aktivitas pegawai.

"Saya tidak setuju kalau kondisi ini karena adanya informasi bakal terutangnya pembayaran TPP," ujarnya.

Dinyatakannya, pegawai adalah pelayan masyarakat dan diberikan gaji tetap setiap bulannya. Pembayaran setiap bulannya tidak pernah tersendat. "Ukuran pegawai itu gaji tetap. TPP itu hanya tambahan penghasilan untuk pegawai. Jadi kalau sepinya pegawai jelang tahun baru ini lantaran TPP terancam tidak dibayarkan, ini penafsiran yang keliru. Saya tidak setuju kalau hal itu dijadikan alasan," tukasnya.

Ia menduga terlihat mulai sepi jelang pergantian tahun anggaran, berkemungkinan besar karena sejumlah pegawai ada yang mengambil cuti tahunan. Kemudian adanya pegawai yang izin tidak masuk kantor lantaran sakit atau hal lainnya.

"Kalau penyebab pastinya, saya juga tidak tahu. Mungkin saja sudah banyak pegawai yang mengambil cuti. Terus mungkin juga ada pegawai yang izin tidak masuk kantor lantaran sakit atau sedang melaksanakan dinas luar," sebutnya.

Terkait TPP November dan Desember 2020, Yan Daryat sangat menginginkan agar bisa dibayarkan secepatnya. Sebab TPP itu bagian dari tambahan penghasilan mereka berdasarkan beban kerja yang ditanggung dan sudah dilaksanakan dengan baik selama ini. "Soal TPP ini, tentu sangat diharapkan semua pegawai. Mudah-mudahan tetap bisa dibayarkan secepatnya," pungkasnya.(**hue**)

Lintas

Dana BOK Capai Rp 15,1 M

MUKOMUKO – Mukomuko mendapat kenaikan alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk tahun depan. Dengan total pagu dana Rp 15,1 miliar. Jumlah ini naik Rp 2,5 miliar dari pagu tahun ini yang hanya Rp 12,6 miliar.

Sekretaris Dinas Kesehatan Mukomuko, Bustam Bustomo, SKM mengatakan, peningkatan BOK dikarenakan tahun depan diprediksi masih disibukkan pada penanganan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu kata Bustam, kegiatan yang dilaksanakan dengan didanai dari BOK, lebih diarahkan kepada penyuluhan, pelacakan dan pemantauan Covid-19.

"Naik (pagunya). Petunjuk teknisnya hampir sama dengan tahun 2020. Tapi kita diarahkan lebih banyak penyuluhan. Juga kegiatan pelacakan dan pemantauan Covid-19," kata Bustam.

Nantinya, BOK itu akan dibagi kepada 17 puskesmas. Besaran dana yang dialokasinya ke setiap puskesmas disesuaikan dengan level dan akreditasi. Seperti Puskesmas Perawatan, tentu akan berbeda besaran dana BOK yang diterima dibanding puskesmas yang belum berstatus perawatan.

"Demikian juga mengenai akreditasi. Terus akan disesuaikan juga dengan beban di masing-masing puskesmas. Salah satunya luas wilayah kerjanya," jelas Bustam.

Secara umum alokasi anggaran untuk bidang kesehatan di Mukomuko meningkat. Seperti untuk anggaran jaminan persalinan (jampersal) naik menjadi Rp 1,07 milir dibandingkan pagu tahun ini hanya Rp 870,7 juta.

Masih menurut Bustam, kenaikan juga terjadi untuk pagu anggaran akreditasi puskesmas. Tahun ini Mukomuko hanya diberikan Rp 999,9 juta. Namun untuk tahun depan, kegiatan fasilitasi akreditasi puskesmas Rp 1,06 miliar.(**hue**)

LPj DD dan ADD Terbakar, Polisi Lakukan Pemeriksaan

PENARIK – Kejadian hanya terbakarnya berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Mekar Mulya, Kecamatan Penarik menimbulkan tanda tanya. Karena kejadian yang terjadi pada Senin (28/12) sore itu, api hanya berhasil membakar dokumen LPj keuangan DD dan ADD saja.

Guna menjawab rasa penasaran warga, dan tidak berkembang ke berbagai dugaan yang dapat merugikan pemerintah desa, Polsek Penarik Raya melakukan pemeriksaan. Sebagaimana dikata Kapolres Mukomuko, AKBP. Andy Arisandi, SH., S.IK, MH melalui Kapolsek Penarik Raya, Ipda. M. Tri Qadlaya, SH.

"Kami akan melakukan pemeriksaan lagi. Karena saat anggota mengetahui dan datang ke TKP pascakejadian, sudah malam hari," kata Tri.

Kejadian itu baru diketahui sekitar pukul 17.00 WIB. Diinformasikan telah terjadi kebakaran berkas LPj Keuangan DD dan ADD yang tersimpan di Almari Arsip di dalam Kantor Desa Mekar Mulya. Kejadian itu cepat diketahui oleh Staf Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan Pemdes Mekar Mulya, M. Khoirul Amin (26) dan Penjabat Kades Mekar Mulya, Yuliana (40).

TERBAKAR: Buku berisi LPj DD dan ADD Desa Mekar Mulya, terbakar.

Saat itu Khoirul Amin masih bekerja. Ia lembur karena menyelesaikan pekerjaan LPj Keuangan DD dan ADD. Sekitar pukul 15.30 WIB ia pergi salat Ashar di Masjid yang berjarak sekitar 100 meter dari lokasi Balai Desa.

Ia tidak menaruh curiga, sehingga pergi tanpa mengunci pintu depan. Pintu tersebut hanya ditutup. Sekembalinya dari masjid dan masuk ruangan, ia mendapati adanya kepulan asap yang bersumber dari almari arsip di bagian bawah. Ia pun dengan cekatan membuka pintu almari dengan cara ditendang. Didapati muncul kobaran api. Spontan, ia keluar mengambil air di toilet untuk memadamkan api.

Api berhasil dipadamkan. Kemudian ia pun melaporkan kejadian tersebut ke Penjabat Kades melalui sambungan telepon. "Menurut keterangan saksi, sumber api belum diketahui. Akan tetapi ada kabel sumber arus yang masuk ke dalam almari, yang tertindih arsip data rak. Kabel itu sebagai sumber arus untuk kipas angin. Jadi sekarang ini kita masih meminta keterangan saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti," demikian Kapolsek.

Mengenai sempat menimbulkan pertanyaan, wajar. Karena diperoleh informasi sebelum kejadian itu, LPj keuangan DD dan ADD desa akan diperiksa Inspektorat Daerah (Ipda) Mukomuko, hari ini (30/12).

Sejauh mana kebenaran informasi itu, Inspektur Ipda Mukomuko, Sukiman, SP mengatakan dirinya belum mendapat laporan prihal ada berkas LPj Keuangan DD dan ADD di Desa Mekar Mulya, terbakar. Selain itu ia juga belum dapat memastikan apakah Desa Mekar Mulya masuk menjadi salah satu sampling pemeriksaan dari Inspektorat. "Saya belum tahu, belum ada laporan," kata Sukiman. (**hue**)

Angka Positif Kian Melonjak

MUKOMUKO – Penambahan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Mukomuko, kian melonjak. Terlebih seminggu terakhir. Dan kemarin, sebanyak 28 penambahan kasus baru, sehingga Mukomuko kini membukukan 341 kasus positif Covid-19.

Ini sudah sangat patut menjadi perhatian serius seluruh masyarakat. Agar tetap menjalankan protokol kesehatan. Serta mentaati maklumat Kapolri dan Surat Edaran (SE) Bupati. Sebab keberadaan Covid-19 di Kabupaten Mukomuko makin mengganas.

Meskipun tingkat kesembuhan warga yang terpapar Covid-19 termasuk tinggi. Tapi perlu dicatat, angka warga yang meninggal dunia, baik yang positif Covid-19 maupun yang berstatus suspect ataupun berstatus probable, juga bertambah.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Mukomuko, Bustam Bustomo, SKM mengatakan, sudah 12 orang meninggal dunia. Dan ada 53 orang yang masih melaksanakan isolasi mandiri. ''Sebelumnya ada 11 orang pasien yang meninggal dunia, dan sekarang menjadi 12 orang. Sekalipun jumlah yang sembuh juga cukup banyak yakni 276 pasien. Namun demkian tetap menuntut kewaspadaan kita semua akan penyebaran Covid-19 ini," ujarnya.

Penambahan sebanyak 28 kasus positif baru, tersebar di delapan kecamatan dari total 15 kecamatan di Kabupaten Mukomuko. Antara lain di Kecamatan Air Dikit sebanyak 2 kasus, Air Rami 1 kasus, Ipuh ada 1 kasus, Kota Mukomuko sebanyak 3 kasus, Kemudian Penarik 1 kasus, Teramang Jaya 12 kasus, dan Teras Terunjam sebanyak 3 kasus.

"Sedangkan untuk 5 kasus lainnya sampai hari ini belum terlacak asal kecamatannya. Belum diketahui tempat domisilinya. Kami bersama tim masih melacaknya," terang Bustam.

Melihat kondisi yang ada, masih berkemungkinan untuk kasus positif di Kabupaten Mukomuko terus bertambah. Apalagi petugas masih melakukan penelusuran kontak erat dari sejumlah kasus positif.

Terus bertambah juga akan dipengaruhi dari kebiasaan lama masyarakat. Seperti mengabaikan imbauan pakai masker, mengabaikan jaga jarak, termasuk tidak mau mencuci tangan dengan sabun. Dan yang lebih parahnya lagi, jika masyarakat masih nekat melaksanakan pesta di tengah mengganasnya Covid-19.

"Saya minta masyarakat untuk tidak melaksanakan pesta dulu. Sebab tidak menutup kemungkinan kegiatan itu bisa menjadi klaster baru penyebaran Covid," sampainya.(**hue**)

PEMERINTAH DESA

LUBUK MUKTI KECAMATAN PENARIK

KABUPATEN MUKOMUKO

Sukses Wujudkan Harapan Masyarakat

PEMERINTAH Desa (Pemdes) Lubuk Mukti Kecamatan Penarik, berhasil menuntaskan pembangunan yang menjadi aspirasi masyarakat. Diantaranya berupa pembangunan jalan rabat beton di Dusun 1 sepanjang 170 meter, dengan pagu dana Rp 150,479 juta. Lalu rabat beton di Dusun 2 sepanjang 100 meter, dengan dana yang dikucurkan Rp 53,582 juta. Selain itu, untuk di Dusun 2 Desa Lubuk Mukti, juga dibangun plat deker sepanjang lima meter dengan dana sebesar Rp 21,523 juta. Tidak hanya itu, peduli pandemi Covid-19, Pemdes Lubuk Mukti juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan juga penyemprotan disinfektan.(**hue/krn**)

WASAPADA COVID: Penyemprotan disinfektan oleh tim penanganan Covid-19 Desa Lubuk Mukti.

PEDULI: Kades Lubuk Mukti didampingi Babinkamtibmas menyalurkan BLT Dana Desa ke warga penerima.

BERKAS: Pemeriksaan berkas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Desa Lubuk Mukti.

PLAT DEKER: Pengecekan pembangunan plat dekar yang sudah tuntas dilaksanakan.

RABAT BETON: Pengukuran hasil pekerjaan pembangunan jalan rabat beton di Dusun 1 dan Dusun 2.

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS KETAHANAN PANGAN
Jalan Terminal Simpang Nangka Air Meles Atas
CURUP - 39153

Rekap Daftar Harga Bahan Pokok Di Tingkat Pengecer Pasar Atas Curup

1. Bayam	2.500	10. Terong Ungu	3.000	19. Daging Sapi	120.000
2. Bawang Daun	6.000	11. Sawi Manis	3.000	20. Daging Kerbau	120.000
3. Cabe Rawit Hijau	32.000	12. Kol	5.000	21. Ikan Nila	26.000
4. Cabe Merah Besar	35.000	13. Bawang Merah	36.000	22. Ikan Mas	30.000
5. Cabe Keriting	40.000	14. Bawang Putih	23.000	23. Ikan Laut Sarden	26.000
6. Buncis	8.000	15. Kangkung	2.000	24. Ikan Lele	24.000
7. Tomat	5.000	16. Kentang	12.000	25. Telur Ayam Ras	22.000
8. Kacang Panjang	5.000	17. Timun	4.000	26. Daging Ayam Ras	32.000
9. Wortel	5.000	18. Kol Kembang	10.000	27. Beras Premium	10.250

Tunggakan Pelanggan PDAM Tembus Rp 7 Miliar

CURUP – Program penghapusan denda tunggakan jika pelanggan PDAM Tirta Dharma melunasi tunggakan dalam jangka waktu yang diberikan hingga hari ini, diharapkan bisa mengurangi jumlah tunggakan. Karena tercatat hingga saat ini total tunggakan pelanggan PDAM Tirta Dharma Kabupaten Rejang Lebong (RL) sudah tembus diangka Rp 7 miliar.

Diungkapkan Direktur PDAM Tirta Dharma Kabupaten RL Orin Retnowati kepada RB kemarin, jumlah tunggakan Rp 7 miliar tersebut tercatat sejak PDAM Tirta Dharma berdiri. ''Jadi sejak berdirinya PDAM Tirta Dharma tahun 1982 lalu hingga tahun 2020 ini, total tunggakan pelanggan mencapai Rp 7 miliar," sampai Orin.

Sedangkan, lanjut Orin, jumlah pelanggan yang menunggak tersebut mencapai 14.400 pelanggan. Mereka tersebar dalam wilayah 14 dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten RL. Penunggak tersebut bukan hanya pelanggan yang masih aktif airnya mengalir dari PDAM, namun juga pelanggan yang jaringan distribusinya sudah sejak lama diputus, namun tetap tercatat sebagai penunggak tagihan. ''Jadi masih banyak yang merupakan pelanggan lama sudah diputus, namun tetap tercatat sebagai penunggak karena memang belum melakukan penyelesaian," lanjut Orin.

Berbagai upaya, tambah Orin, sampai sejauh ini sudah mereka lakukan untuk mengurangi jumlah tunggakan tersebut, agar denda tidak semakin meningkat setiap tahunnya. Mulai dari pembentukan tim khusus penagihan langsung ke rumah pelanggan dan berbagai program, seperti diakhir tahun 2020 ini.

''Kita sudah bentuk tim khusus penagihan langsung ke rumah-rumah pelanggan yang menunggak. Mereka yang distribusi airnya masih aktif, kalau tidak ada itikad baik kita lakukan pemutusan. Namun jika mereka mau menyicil, kita berikan waktu hingga mereka bisa menyelesaikan tunggakan. Untuk program sendiri, kita diakhir tahun ini sudah menggelar dua program khusus pelanggan. Yaitu hadiah bagi pelanggan teladan dan penghapusan denda bagi penunggak yang mau melunasi tunggakan," demikian Orin.**(dtk)**

Wanda/rb

OPTIMIS: BPKD Kabupaten RL Optimis APBD 2021 sudah bisa direalisasikan dan dilaksanakan mulai awal Januari mendatang.

Awal Januari, APBD Sudah Harus Bergerak

CURUP – Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Rejang Lebong (RL) memastikan, awal Januari 2021 seluruh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) sudah bisa melaksanakan kegiatan. Hal ini setelah evaluas Raperda APBD Kabupaten RL selesai dievaluasi oleh Pemprov Bengkulu.

Dijelaskan Kepala BPKD Kabupaten RL Wuwun Mirza, SE, MT kepada RB kemarin diruang kerjanya, hasil evaluasi provinsi juga sudah selesai mereka bahas dan dijawab oleh Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Kabupaten RL serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten RL pada Senin (28/12) lalu. ''Seluruh hasil evaluas provinsi sudah selesai dibahas dan dijawab oleh Banggar dan TAPD," sampai Wuwun.

Jika tidak ada kendala, sambung Wuwun, hari ini mereka akan mengantar hasil tersebut pemprov. Sehingga bisa segera mendapatkan persetujuan gubernur dan nomor perdanya. Evaluasi yang didapatkan disebutkan tidak terlalu prinsip, sehingga sifatnya hanya semacam perbaikan syarat administrasi saja.

''Besaran APBD Tahun Anggaran 2021 sendiri lebih kurang Rp 1 trilyun dengan rincian DAU (dana Alokasi Umum, red) hanya sebesar Rp 570 miliar turun dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 660 miliar. Lalu sisanya sebesar Rp 430 miliar berupa DAK (Dana alokasi khusus, red), DBH (dana bagi hasil, red), PAD (pendapatan asli daerah, red) dan DID (Dana Insentif Daerah, red) yang diperoleh dari prestasi Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian, red) tahun 2019 lalu," sambung Wuwun.

Ditambahkan Wuwun, jika sudah disetujui Gubernur dan mendapatkan nomor, maka awal Januari, APBD 2021 sudah harus bergerak. Seluruh OPD Sudah haru menyiapkan SK Penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anngaran (KPA) dan bendahara. ''Termasuk juga menyiapkan untuk pemberian besaran UP (Uang Persediaan, red) demikian Wuwun.**(dtk)**

Wanda/rb

DIKBUD: Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten RL saat ini sedang menyiapkan administrasi pembayaran TPG Oktober-November untuk guru SD dan SMP yang in sya Allah cair diawal Januari 2021.

TPG Guru SD/SMP Dibayar Minggu Depan

CURUP – Tunjangan Profesi Guru (TPG) guru SD dan SMP di Kabupaten Rejang Lebong (RL) untuk Triwulan (TW) IV sepertinya sama dengan proses pembayaran yang akan dilakukan Pemprov Bengkulu. Dimana untuk TW IV tersebut dibayarkan pada minggu pertama Januari 2021 atau minggu depan.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten RL Wuwun Mirza, MT kepada RB kemarin. ''Benar, In Sya Allah untuk pembayaran TPG TW IV ini dibayarkan awal Januari. Hanya saja untuk pembayarannya baru bisa dilakukan untuk Oktober-November 2020," sampai Wuwun.

Sedangkan untuk pembayaran TPG Desember 2020, sambung Wuwun, baru bisa dibayarkan setelah adanya Surat Keputusan (SK) Carry Over dari pemerintah pusat. Karena memang dana untuk pembayaran TPG berasal dari pemerintah pusat dan jumlahnya masih belum mencukupi untuk pembayaran hingga Desember.

Ditambahkan Wuwun, jumlah dana TPG setiap bulan berkisar Rp 5,7 miliar yang artinya untuk tiga bulan (Oktober-November-Desember) lebih kurang sebesar Rp 17,226 M. Sedangkan uang yang ditransfer pusat berkisar diangka Rp 14 miliar lebih atau masih kurang sebesar Rp 3,061 miliar. ''Karena dana ini memang sumbernya dari pemerintah pusat. Makanya sembari menunggu kekurangan tersebut, kita ambil solusi pembayaran dilakukan 2 bulan dulu di awal januari 2020 mendatang," imbuh Wuwun.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten RL Khirdes Lapendo Pasju, S.STP, M.SI tidak membantah hal tersebut. Sehingga mereka berharap guru penerima TPG untuk bisa memaklumi kondisi dan bersabar. ''Kita sedang lakukan proses administrasi, in Sya Allah minggu depan atau awal januari 2021 TPG Oktober dan November sudah bisa cair," singkat Khirdes.**(dtk)**

SR Terbesar, FIS Terkecil

Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

CURUP – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong (RL) sudah selesai mengemumkan hasil audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) masing-masing paslon. Dimana seluruh LPPDK paslon sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berbeda antar paslon.

''Alhamdulillha seluruh KAP sudah menyerahkan hasil audit dana kampanye dari seluruh paslon. Kita juga sudah menindaklanjuti sesuai regulasi dan jadwal yang ditentukan. Yaitu menyerahkan hasil audit kepada masing-masing calon serta Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong skaligus melakukan pengumuman hasil audit dana kampanye tersebut," sampai Komisioner KPU Kabupaten RL Koordinator Divisi Hukum Faham Syah, M.Pd.I kepada RB kemarin.

Dari hasil audit diketahui, penerimaan Paslon SR menjadi yang terbesar yaitu mencapai Rp 2,218 miliar. Namun yang dikeluarkan hanya sebesar Rp 415 juta dan tersisa Rp 1,803 miliar. Selanjutnya paslon SAHE pemasukan sebesar Rp 926,5 juta dengan jumlah pengeluaran yang sama alias tidak ada sisa dana kampanye.

Kemudian untuk paslon FF, tambah Faham, yaitu pemasukan sebesar Rp 748,74 juta dengan pengeluaran sebesar Rp 454,9 juta dan tersisa Rp 293, 8 juta. Sedangkan yang terkecil yaitu pasangan FIS dengan pemasukan sebesar Rp 477 juta dengan pengeluaran hanya sebesar Rp 299,9 juta dan tersisa Rp 177 juta. ''Jadi dari hasil audit, untuk yang paling besar penerimaan dana kampanye adalah pasangan SR dan terkecil pasangan FIS," demikian Faham.**(dtk)**

Tambahan 6 Kasus Konfirmasi

CURUP – Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Rejang Lebong (RL) kembali mencatat adanya penambahan 6 kasus konfirmasi baru dan 10 selesai kasus konfirmasi atau sembuh. Seperti yang disampaikan juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sekaligus Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten RL Syamsir, S.KM, M.KM kepada RB.

SYAMSIR

Dirincikan Syamsir, untuk kasus positif baru masing-masing kasus 479 laki-laki (40) asal Kecamatan Curup berstatus tenaga kesehatan (Nakes), kasus 480 perempuan (48) asal Kecamatan Curup Timur dan kasus 481 laki-lakai (35) asal Kecamatan Curup. Kemudian kasus 482 perempuan (63) asal Kecamatan Curup Utara, kasus 483 perempuan (46) asal Kecamatan Curup dan kasus 484 perempuan (39) asal Kecamatan Selupu Rejang. ''Total tambahan konfirmasi positif hari ini (kemarin, red) sebanyak 6 kasus baru. Sehingga total keseluruhan mencapai 484 kasus," sampai Syamsir.

Dilanjutkan Syamsir, untuk pasien yang sudah dinyatakan selesai kasus konfirmasi atau sembuh masing-masing dari Kecamatan Curup ada tiga kasus, yaitu kasus 377, 378 dan kasus 449. Kemudian dari Kecamatan Curup Selatan juga tiga kasus, yaitu kasus 438, 448 dan kasus 452. Lalu dari Kecamatan Selupu Rejang sebanyak dua kasus yaitu kasus 376 dan kasus 437. Serta dari Kecamatan Curup Timur masing-masing kasus 379 dan kasus 451.

''Dengan adanya 10 tambahan selesai kasus konfirmasi atau sembuh ini, dari 484 kasus konfirmasi sudah sembuh sebanyak 435 dan sisanya masih dalam pengawasan sebanyak 49 kasus. Sedangkan jumlah sampel yang diperiksa di Laboratorium sudah sebanyak 2.285 sampel. Dengan jumlah positif 484 sampel dan jumlah negatif sebanyak 1.801 sampel," demikian Syamsir.**(dtk)**

Pola Berubah, Pendataan DTKS Dihentikan Sementara

CURUP – Proses verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini sudah dihentikan sementara. Ini setelah adanya perubahan pola pendataan DTKS tersebut seiring bergantinya Menteri Sosial (Mensos) RI beberapa waktu lalu. Perubahan pola pendataan disampaikan melalui surat resmi dari kementerian yang sudah diterima Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Rejang Lebong (RL) beberapa hari lalu.

Dijelaskan Kepala Dinsos Kabupaten RL Zulfan Effendi, SE, MM kepada RB, perubahan pola pendatan tersebut mulai dari petugas yang akan melakukan verifikasi dan validasi DTKS serta proses lainnya. Dimana dukungan SDM dan anggaran direncakan akan disiapkan pemerintah pusat. ''Proses verval DTKS ini kedepan rencananya akan menggandeng Kemendagri dan perguruan tinggi, termasuk tenaga pendatanya akan direkrut secara khusus oleh Kemensos," sampai Zulfan.

Selain itu, sambung Zulfan, proses verval DTKS akan dilakukan secara berkesinambungan setiap enam bulan sekali. Hal ini agar data dan fakta jumlah warga miskin penerima bantuan sosial bisa benar-benar update dan sesuai kriteria. Sehingga perubahan status sekecil apapun seorang warga dalam anggota keluarga bisa update secara berkala dengan verval enam bulan sekali. ''Misal seseorang yang beberapa bulan sebelumnya diketahui menganggur dan belum menikah, saat ini statusnya sudah bekerja dan menikah, sehingga data juga harus diubah," imbuh Zulfan.**(dtk)**

Iklan Mini BERDAYA MAKSI
Tarif MURAH dengan Jangkauan LEBIH LUAS
Tarif Iklan Rp 5.500 per baris. Minimal 3 baris, maksimal 10 baris.
KOTA BENGKULU : GRAHA PENA, Jl. P. Natadirja No. 69 Km 7 Telp (0736) 22060 & (0736)-20882
CURUP : DEPOT KORAN YANTO (samp wrg Kopi Ria), Jl. Merdeka No. 219 Telp (0732) 23516
MANNA : WAHAB ANANG AGENCY, Jl. Jend. Sudirman Simpang Tiga Rukis, Telp (0739) 21407

• JUAL TANAH •
LT 10x20, Lok. Prumnas Pinang Mas, SHM, Hrg Nego. Tanpa Perantara. Hub. 085228004888

• KEHILANGAN •
SERTIFIKAT, Tanah Wakaf No.00001/Tj.Agung, NIB 07.06.11.1200002, A/n Drs Buyung Jundran, Almt Desa Tj. Agung Kec. Ulu Talo Kab. Seluma

• RUANG USAHA •
DIJUAL, 2 Ruko skaligus, co2k utk kntor, Jl.S.Parman No.19, Kota Bkl, Masing 2, 3 Lantai, LT 282 m2, LB 408 m2, Hrg 3M, Rumi 081804057800 / 08112959596

DIJUAL RUMAH
Lokasi di UNIB Belakang Gang Melati (persis depan Gedung Rektorat UNIB)
beserta dengan 10 kamar kosan aktif.
dari jalan Raya Kandang Limun hanya berjarak 100m
ukuran tanah 20x20m.
lokasi strategis untuk investasi kos-kosan
buka harga 1.1milyar (nego)
Hubungi:
Ibu Eti 081317567743

DI JUAL RUKO 2 LANTAI
LOKASI STRATEGIS
Lokasi. JL. M.T. Haryono Penggantungan, Kec. Ratu Samban, Ruko 2 tingkat di dekat simpang Sentiong, Kota Bengkulu. UK. 3,7m x 14m Harga nego
Minat Hub. April
0813 7347 7299

JUAL RUKO
Dijual Ruko letak strategis depan RS DKT Kompi Bengkulu (pas didepan poliklinik RS DKT) sebelah kiri RM padang dan sebelah kanan warung Bakso
fasilitas : 1 kamar, kamar mandi, ruang masak, sumur bor & tedmon, cocok untk usaha apa saja.
Harga 360 Juta nego
Minat hubungi :
082179363606 / 082375706151

JUAL TANAH/RUMAH
Luas Tanah 634 M2, SHM,
Rumah Fas :
3 Kmr Tidur, 1 R. Tamu,
1 R. Tv/Keluarga,
2 Teras Muka dan Belakang,
1 R. Makan, 2 K. Mandi, 1 R. Masak
Tanah Sudah Dipagar Keliling,
Pagar Besi dan Tembok
Alamat : Jl. Kapuas 3 Dalam Rw. 05/ Rt. 17 No. 34
Kel. Padang Harapan Bkl
Hubungi :
0878 9496 1917
0819 1931 8688
(Berminat silahkan cek lokasi)

Ganti Saja Pengurus PMI

Dewan Nilai Tak Ada Peran

KEPAHIANG – Lantaran dinilai tidak berperan dalam ketersediaan darah bagi masyarakat yang sangat membutuhkan, DPRD Kabupaten Kepahiang meminta Pemkab Kepahiang melakukan perombakan kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kepahiang.

Disampaikan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang, Ansori, M. Dia mempertanyakan peran PMI Kabupaten Kepahiang selama ini. Setiap pasien membutuhkan daerah selalu harus direpotkan mencari pendonor darah.

"Harusnya PMI Kabupaten Kepahiang memiliki stok darah dan data pendonor darah di Kabupaten Kepahiang. Ini akan mempermudah petugas medis dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga. Kita lihat dalam beberapa waktu belakangan, lebih banyak relawan darah yang pontang panting mencari darah untuk pasien. PMI-nya kemana?," tanya Ansori.

Untuk itu Komisi I DPRD Kabupaten Kepahiang berencana memanggil Ketua PMI Kabupaten Kepahiang guna membahas bersama kendala yang dihadapi. Kenapa PMI tak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan donor darah.

"Paling tidak nanti disampaikan, apa yang menjadi kendala PMI dan apa saja peran mereka selama ini untuk membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan donor darah. Buktinya setiap bulan pasti ada persoalan kebutuhan darah yang diposting di media sosial maupun secara langsung," ujar Ansori.

Senada disampaikan Anggota DPRD Kepahiang lainnya Joko Triono. Menurutnya PMI selalu dibantu oleh Pemkab terkait anggaran hibah yang mencapai ratusan juta rupiah pertahun. Dengan begitu harusnya peran serta PMI bisa ikut membantu kebutuhan masyarakat akan darah dan kegiatan sosial lainnya.

"Seperti di Kecamatan Ujan Mas misalnya ada 2 penderita thalasemia, yang setiap bulannya membutuhkan donor darah. Pasien tersebut dibantu relawan untuk kebutuhan donor darah. Kami berharap PMI Kepahiang memaksimalkan peran mereka dalam membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukankah Pemkab sudah membantu dengan dana hibah," tukas Joko.**(sly)**

Belajar Tatap Muka

Kecamatan Kepahiang Tetap Secara Online

KEPAHIANG - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Kepahiang merencanakan akan kembali membuka kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah pada bulan Januari 2021. Hanya saja dari 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Kepahiang, rencana belajar tatap muka di sekolah akan difokuskan di 7 kecamatan saja.

Kecuali sekolah di wilayah Kecamatan Kepahiang yang tetap online atau daring. Ini mengingat sampai saat ini Kecamatan Kepahiang masih masuk dalam kategori rawan penyebaran Covid-19, masih dalam zona merah.

Kabid Dikdas Dinas Dikbud Kabupaten Kepahiang, Nining Faweli Pasju, S.Pt, MM, dari 92 SD dan 28 SMP di Kabupaten Kepahiang, sebanyak 22 SD dan 5 SMP terletak di Kecamatan Kepahiang. Mengingat risiko penyebaran Covid-19 di wilayah ini, maka rencana belajar tatap muka di Kecamatan Kepahiang ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. "Usulan yang kita sampaikan untuk belajar tatap muka hanya di 7 kecamatan saja," ujar Nining.

Diketahui sebelumnya, Dinas Dikbud Kabupaten Kepahiang sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) beberapa waktu lalu. Dari koordinasi tersebut, didapat kesimpulan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Padah Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), diketahui kegiatan belajar mengajar di sekolah sudah bisa dilaksanakan di semua zona.

"Jadi tidak ada lagi pakai zona-zana warna apapun, semua zona sudah bisa melaksanakannya. Namun dengan syarat, harus ada persetujuan dari orang tua, sekolah dan pemerintah daerah. Tetap mempedomani aturan terkait protokol kesehatan dalam pelaksanaannya," jelas Nining.

Untuk persetujuan, sambung Nining, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan instruksi dari Pemkab Kepahiang mengenai rencana akan dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sementara kalau orang tuanya murid, sebagian besar menginginkan kembali anaknya untuk belajar di sekolah.

"Walaupun memang masih ada beberapa yang khawatir, namun sebagian besar menyarankan untuk kembali belajar di sekolah. Karena menurut para orang tua, metode pembelajaran dari rumah melalui media daring, dinilai tidak efektif bagi para murid," demikian Nining.**(sly)**

ARIE/RB

RAPAT: Tampak pejabat OPD di lingkungan Pemkab Kepahiang sedang mengikuti rapat TEPRA di aula Setdakab Kepahiang, kemarin (29/12).

Empat OPD Tetap Merah

KEPAHIANG - Pemkab Kepahiang kembali melakukan rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk akhir tahun anggaran 2020 di aula Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kepahiang, kemarin (29/12). Hasilnya, dari 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Kepahiang, sebanyak 4 OPD tetap mendapat rapor merah.

Rapor merah lantaran keempat OPD masih sangat minim serapan anggarannya berdasarkan hasil evaluasi pada 15 Desember 2020 lalu. Masing-masing, terendah, BPBD yang hanya mencapai 16,33 persen. Disusul Dinas PUPR hanya 29,86 persen. Kemudian Badan Keuangan Daerah (BKD) 54,17 persen dan RSUD Kepahiang serapan anggaran 60,06 persen.

Adapun rincian serapan anggaran keempat OPD tersebut, RSUD Kepahiang dari pagu anggaran Rp 55,14 miliar terserap Rp 33,11 miliar. BKD pagu anggaran Rp 217,9 miliar terserap Rp 123,9 miliar. Dinas PUPR terserap Rp 26,3 miliar dari pagu anggaran Rp 88,2 miliar. BPBD sebesar Rp 4,4 miliar dari pagu anggaran Rp 27,4 miliar.

Bupati Kepahiang Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, MM, IPU yang memimpin rapat TEPRA tersebut menjelaskan alasan sehingga masih ada empat OPD mendapatkan rapor merah. Seperti BKD yang terkendala lantaran disebabkan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Termasuk didalamnya alokasi Dana Desa (DD) yang proses pencairannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sehingga tidak tercatat di BKD.

"Kalau BPBD karena dana hibah baru masuk di akhir tahun. Saat ini sudah tender, mudah-mudahan dalam waktu 6 bulan ke depan sudah selesai. Kemudian BKD, masalahnya pada DD tidak masuk kas daerah, tetapi langsung ke kas desa," jelas Bupati.

Sementara untuk Dinas PUPR, sebelumnya dapat bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK), namun ternyata pertengahan tahun DAK-nya ditarik lantaran wabah Covid-19. "Memang persoalan ini perlu perhatian khusus oleh kita. Namun yang pastinya saat ini keempat OPD tersebut pada dasarnya sudah maksimal serapannya, hanya saja beberapa persoalan administrasi yang membuat diatas kertas serapan anggarannya masih rendah," demikian Bupati.**(sly)**

ARIE/RB

ANGKUT SAMPAH: Salah satu armada DLH sedang mengangkut sampah di kawasan Taman Santoso.

THL Kebersihan Tetap Dibutuhkan

KEPAHIANG – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kepahiang memastikan tetap memanfaatkan jasa Tenaga Harian Lepas (THL) untuk tenaga kebersihan. Hal ini mengingat peran tenaga kebersihan sangat dibutuhkan dalam mengatasi persoalan sampah yang menjadi permasalahan kronis di Kabupaten Kepahiang.

"Tidak ada rencana untuk merumahkan tenaga kebersihan. Karena untuk persoalan sampah yang terjadi selama ini, peran 186 THL di DLH sangat dibutuhkan. Termasuk tenaga kebersihan yang berjumlah 25 orang," jelas Kepala DLH Mukhtar Yatib, S.Pd.

Mukhtar menjelaskan saat ini jumlah petugas kebersihan sebanyak 186 orang. Jumlah tersebut diharapkan dapat memaksimalkan penanganan kebersihan di wilayah Kabupaten Kepahiang.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan jadi kendala petugas dalam menjaga kebersihan. "Kita selalu ingatkan kepada petugas kebersihan dan masyarakat jangan ada lagi penumpukan sampah," sebutnya.**(sly)**

Pengcab Wajib Serahkan Laporan Kinerja Tahunan

KEPAHIANG – Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Kepahiang, Tedy Adeba, ST mengimbau kepada seluruh Pengurus Cabang (Pengcab) olahraga yang ada di Kabupaten Kepahiang untuk segera menyampaikan laporan tahun 2020. Ini sebagai syarat bagi pengcab olahraga untuk mendapatkan anggaran pembinaan dari pemerintah.

Kendati memang anggaran yang dialokasikan untuk bidang Pemuda dan Olahraga (Pora) tidak begitu banyak, namun Tedy menegaskan, dari sekitar 29 pengcab yang ada di Kabupaten Kepahiang saat ini, belum satupun menyampaikan laporan tahunannya ke Disparpora. Hal ini membuat Disparpora belum bisa menyalurkan bantuan pembinaan kepada pengcab-pengcab yang ada.

"Ya untuk bisa dapatkan bantuan pembinaan, pengcab harus lebih dulu menyampaikan laporan tahunannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengcab tersebut benar-benar aktif dalam melakukan pembinaan potensi olahraga di daerah," tegas Tedy.

Disparpora tidak bisa menyalurkan bantuan kepada pengcab olahraga yang tidak memiliki kegiatan yang tertuang dalam laporan tahunan. Diakui Tedy lantaran belakang ada beberapa cabang olahraga yang telah menyampaikan proposal bantuan kepada Disparpora Kabupaten Kepahiang, namun selama ini tidak terlihat hasil pembinaannya. "Anggaran daerah ini harus dipertanggungjawabkan. Pengcab wajib mengikuti regulasi yang ada. Jangan sampai nanti ada pengcab yang tidak aktif, atau tidak tampak programnya namun dapat bantuan dari pemerintah," bebernya.

Diakui Tedy, bantuan pembinaan untuk tiap pengcab tidaklah sama. Didasari sejauh mana prestasi dan potensi yang dimiliki oleh pengcab-pengcab tersebut. Termasuk sistem dan mekanisme pembinaan yang dilakukan. Semua akan terlihat dari laporan tahunan yang disampaikan.

"Anggaran pembinaan cabor kita tidak begitu besar, yakni di angka Rp 200 juta. Pembagiannya pun tidak sama, karena kita akan menilai dari kriteria cabornya. Apakah cabor prestasi, cabor potensial atau cabor yang masih dalam pengembangan. Jadi tidak boleh nantinya ada kecemburuan mengenai pembagian dana pembinaan ini," pungkasnya. **(sly)**

Ciptakan Keamanan dan Bantu Kemajuan Daerah

Pangdam Resmikan Denzipur Gana Bhadrika

BENTENG - Panglima Kodam (Pangdam) II / Sriwijaya, Mayor Jendral (Mayjend) TNI, Agus Suhardi, kemarin (29/12) meresmikan Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 14/Gana Bhadrika yang bertempat di Karang Tengh Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng).

Dalam sambutannya, Pangdam meminta kepada semua personil TNI yang berada di Denzipur ini untuk bisa menciptakan wilayah menjadi aman, kondusif, sehingga perekonomian bisa berjalan dengan lancar dan pembangunan bisa berjalan dengan baik. Karena sesuai dengan tujuan bersama untuk menciptakan keamanan dan membantu kemajuan daerah.

"Setelah diresmikan ini, maka kita akan turut serta dalam membangun Kabupaten Benteng ini, sehingga Zeni Tempur ini dapat berperan serta dalam memajukan suatu daerah. Karena Zeni Tempur ini memiliki kualifikasi untuk bisa melaksanakan pembangunan, sehingga nantinya bisa dimanfaatkan oleh Pemkab Benteng. Dengan begini percepatan pembangunan bisa berjalan dengan baik dan lancar," tegasnya.

Dia menambahkan, sebagai satuan baru, tentunya nanti akan menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik itu personil maupun materil. Namun itu bukan suatu alasan untuk tidak bekerja secara maksimal, karena dalam melaksanakan suatu tugas harus dilaksanakan dengan tulus, maksimal dan bersungguh-sungguh.

"Saya berharap kepada seluruh personil Detasemen Zeni Tempur 14/Gana Bhadrika untuk segera beradaptasi dengan lingkungan tugas, dengan memahami adat istiadat dan kehidupan di wilayah ini. Kemudian harus menjalin komunikasi dan koordinasi Pemkab, Polri dan segenap komponen masyarakat dalam menciptakan stabilitas dalam wilayah yang aman dan kondusif," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Bupati Benteng, Dr. H. Ferry Ramli, SH, MH mengatakan, memang Denzipur ini sangat dibutuhkan di Bengkulu Tengah. Sehingga ke depannya akan banyak sekali yang bisa Denzipur bantu untuk pemerintah dalam melakukan percepatan pembangunan.

"Maka dari itu kita bersyukur dan mengucapkan terima kasih, karena sudah didirikan Detasemen Zeni Tempur 14/Gana Bhadrika di Kabupaten Benteng ini. Selain itu juga, Zeni Tempur ini bisa menciptakan situasi yang aman dan kondusif, karena dengan Zeni Tempur ini bisa memberikan wawasan kepada masyarakat kita. Apabila masyarakat dan TNI sudah menyatu maka keamanan akan tercipta dengan sendirinya," jelasnya.(**jee**)

JERI/RB

RESMIKAN: Pangdam II Sriwijaya, Mayjend TNI Agus Suhardi, didampingi Wagub Bengkulu, Dedy Ermansyah dan Bupati Benteng, Ferry Ramli, SH, MH saat meresmikan Denzipur 14/Gana Bhadrika.

Pengembalian Lahan Hibah Kantor Pemkab, Bertahap

Tahap Awal 300 Meter Persegi

BENTENG – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Pertanahan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) memastikan untuk pengembalian lahan hibah perkantoran Pemkab Benteng kepada 96 penghibah akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal ini 96 penghibah akan menerima pengembalian lahan seluas 300 meter persegi setiap penghibah dan ini akan ditargetkan pada awal tahun 2021 mendatang.

Kepala Dinas Perkim dan Pertanahan Benteng, Drs, Hendri Donal, SH, MH didampingi oleh Kasi Perencanaan dan Izin Penggunaan Tanah, Yogi Vulanda Saputra menjelaskan, kepastian tahap pertama pengembalian lahan penghibah ini, setelah pada APBD Perubahan beberapa waktu lalu anggaran operasionalnya sudah dianggarkan.

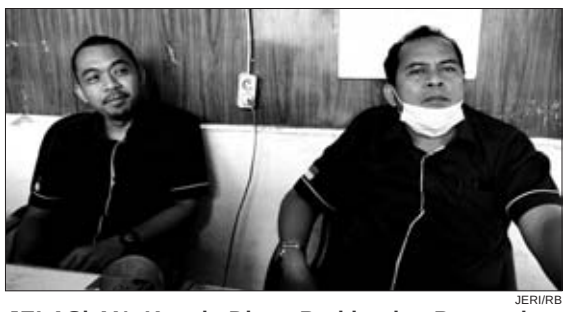

JERI/RB

JELASkAN: Kepala Dinas Perkim dan Pertanahan Benteng, Drs, Hendri Donal, SH, MH menjelaskan soal pengembalian lahan hibah kepada masyarakat.

"Sama-sama diketahui, pada wabah Covid-19 beberapa waktu lalu, anggaran operasional kita dipangkas habis karena adanya rasionalisasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Namun di APBD Perubahan dianggarkan kembali untuk pengerjaannya, sehingga semua proses pengerjaannya mundur pada akhir tahun ini," ungkapnya.

Dia menambahkan, untuk saat ini tahapan proses pengembalian lahan sudah dilaksanakan dan sudah masuk ketahapan merapikan kembali kavlingan tanah yang akan dilepaskan dan dihapuskan sebagai daftar aset Pemkab Benteng. Ditargetkan pada awal tahun 2021 sudah ada hasilnya untuk dihapuskan dari aset dan kemudian ditindaklanjuti akan diserahkan kepada 96 penghibah.

"Diharapkan ke depannya kita cari solusi bersama, adanya bantuan atau program pensertifikatan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Benteng. Sedangkan untuk sisa lahan yang masih ada dan harus diberikan pada tahap selanjutnya, 96 penghibah lahan akan menerima sisa lahan sebesar 30 persen sesuai dengan luas lahan yang merekan dihibahkan," jelasnya.

Sambungnya, secara total luas lahan yang akan dikembalikan 46 hektare, yang berlokasi di Desa Renah Semanek Kecamatan Karang Tinggi. Pengembalian lahan dalam bentuk kaplingan yang setelah pengukuran setidaknya ada 300 hingga 450 kapling nantinya. "Tetapi kita berkomitmen untuk diselesaikan pengembalian lahan kepada warga yang sudah menghibahkan lahannya beberapa waktu lalu untuk perkantoran Pemkab Benteng. namun kita berharap kepada warga untuk tetap bersabar dan mengerti, karena kita selalu berusaha dalam memproses mengembalikan lahan mereka ini.

Untuk ketersediaan anggaran operasional kegiatan dalam APBD tahun 2021sudah disediakan sebesar Rp 75 juta," Pungkasnya. **(jee)**

LINTAS

JERI/RB

POSPAM: Anggota Polres Benteng selalu siaga dalam melakukan keamanan dan mengawasi warga untuk tetap menerapkan prokes.

Melanggar Prokes, 324 Pengendara Ditegur

BENTENG – Polres Bengkulu Tengah (Benteng) diketahui sejak 21 Desember lalu sudah mendirikan dua Pospam Operasi Lilin Nala tahun 2020. Tim gabungan yang bertugas di dua Pospam Ops Lilin Nala terus melakukan razia yustisi penegakan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Sejak 21 Desember lalu diketahui jika terdapat 324 pengendara menerima teguran maupun imbauan dikarenakan melanggar protokol kesehatan (Prokes).

Kapolres Bengkulu Tengah (Benteng), AKBP. Ary Baroto, S.Ik, MH melalui Kabag Ops, AKP. Januri Sutirto mengatakan, Dua pospam tersebut berada di kawasan liku sembilan Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung dan Desa Pasar Pedati Kecamatan Pondok Kelapa. Total terdapat 30 personel yang ditempatkan di setiap pospam.

"Adapun dalam kegiatan razia yustisi yang kita gelar ini, dalam satu hari dilaksanakan sebanyak dua kali, pertama razia dilaksanakan pada pagi hari dan sore hari. Rata-rata dalam satu hari terdapat 36 pengendara yang melanggar, sehingga dari sembilan hari ini total rata-rata ada 324 warga yang melanggar dan kita berikan teguran hingga imbauan," tegasnya. (**jee**)

Dishub Tetapkan Tarif Parkir Mobil Rp 3.000

BENTENG - Dengan maraknya terjadi pungutan liar Pungli) di beberapa titik lokasi parkir, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), memastikan saat ini ada 14 titik lokasi parkir yang sudah menjalin kerja sama atau MoU dengan pihaknya. Kemudian tarif yang ditetapkan sesuai Perda yakni Rp 1.000 untuk motor dan Rp 3.000 untuk mobil.

Hal itu dikatakan Kepala Dishub Benteng, Durani. Dijelaskannya, ke 14 titik lokasi parkir yang legal itu yakni di Pasar Taba Penanjung, Wisata Bendungan Padang Segaro Desa Sukarami, BRI Karang Tinggi, Pasar Karang Tinggi. Kemudian Rumah Makan Bude Septi Kembang Seri, Pasar Kembang Seri, Klinik Rizki Medika.

JERI/RB

PARKIR: Salah satu titik parkir yang berada di klinik rizki medika Desa Kembang Seri Kecamatan Talang Empat.

"Lalu, wisata Curup Embun Desa Lagan Bungin, wisata Curup Cay dan wisata Curup Pengantin di Desa Bukit. Ada juga Pasar Talang Pauh, Pasar Sidodadi, wisata Sungai Suci dan Wisata Danau Gedang. Inilah 14 titik parkir yang sudah menjalin MoU dengan kita dan menyetorkan retribusi parkir sebagai bentuk PAD kepada Pemkab Benteng," ungkapnya.

Dia menambahkan, selain 14 titik tersebut apabila ada yang memungut parkir mengatas namakan Dishub, itu dipastikan ilegal dan tidak benar. Kemudian apabila di 14 titik parkir tersebut mengambil parkir di luar aturan yang sudah ditetapkan maka yang bersangkutan pungli, karena semuanya sudah diatur di Perda untuk motor Rp 1000 dan mobil Rp 3000.

"Kemudian selain bekerja sama dengan kita memang ada beberapa titik parkir tidak membayarkan retribusi ke kita, namun mereka menyetorkan pajak parkir langsung ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Benteng, dan itu tetap legal. Yang membayar langsung pajak parkir ini seperti Wisata Wahana Surya, Indomaret dan beberapa titik lainnya," ungkapnya.

Lanjut Durani, apabila ke depannya masih ditemukan terjadinya pungli di beberapa titik wisata dan titik lainnya yang sudah sangat meresahkan semua warga dan pengunjung, maka pihaknya mmeinta Pemerintah Desa, warga dan semua pengunjung wisata melapor ke kepolisian perihal kejadian ini. "Apabila ragu melapor kepolisian silahkan lapor ke Dishub agar nanti bisa diproses dan untuk ditindaklanjuti," ujarnnya.(**jee**)

Usai Liburan Semester, KBM Tetap Daring

BENTENG – Usai libur semester pada Senin (4/1) tahun 2021 mendatang, seluruh SD/MI maupun SMP dan MTs di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) melalui daring.

Hal itu berdasarkan Surat Edaran (SE) dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan (Disdikbud) Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng). Kepala Disdikbud Benteng, Saidirman, SE, MM mengatakan, semua ini dilakukan dikarenakan saat ini kasus Covid-19 di Kabupaten Benteng sedang meningkat kembali. Sehingga untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 tersebut maka KBM harus dilakukan dengan daring kembali, setelah sebelumnya KBM tatap muka sudah diperbolehkan disemua SD/MI dan SMP/MTs

"Dengan kondisi saat ini, maka pada saat hari pertama sekolah pada 4 Januari nantinya, semua siswa hanya diperbolehkan melakukan KBM secara daring dan luring sampai dengan 31 Januari mendatang. Semua ini harus dilakukan. Sehingga KBM tatap muka disekolah untuk saat ini harus diberhentikan sementara," jelasnya.

Dijelasksn Saidirman, KBM sistem luar jaringan (Luring) adalah, dimana setiap siswa akan diberikan modul dan satu minggu sekali, para siswa akan diberikan pemahaman mengenai pelajaran yang ada di dalam modul tersebut. Namun KBM sistem Luring ini hanya berlaku bagi siswa ataupun oangtuanya yang tidak miliki handphone, maupun yang sulit jaringan.

Saidirman menambahkan, ia meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk menegaskan kepada seluruh guru dan peserta didik agar tetap mematuhi semua protokol kesehatan (prokes). Seperti harus disiplin memakai masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dan siswa dilarang untuk berkumpul dan pergi ke tempat keramaian. (**jee**)

Enam OPD Daftarkan PTT ke Asuransi Jiwa

BENTENG – Enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah (Benteng) mendaftarkan Pegawai Tidak Tetap (PTT) ke asuransi jiwa program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Jaminan Kematian (JKm). Enam OPD tersebut terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pemadam Kebakaran (DPK), Badan Keuangan Daerah (BKD), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Pasalnya, terhitung tahun depan PTT atau honorer ini akan terdaftar pada asuransi jiwa pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).

Kepala BKD Benteng, Welldo Kurniyanto, SE, MM mengatakan, jika Pemkab Benteng sudah menjalin kerjasama dengan PT. Taspen untuk jaminan kerja dan kematian bagi PTT. Namun jumlah PTT pasti yang akan diakomodir belum diketahui pasti, karena hingga saat ini masih dilakukan pendataan oleh setiap OPD yang bersangkutan.

"Dengan menjalin kerja sama ini, maka tahun depan sudah mulai terealisasi. Tapi berapa jumlah PTT masih didata karena disesuaikan dengan penerbitan SK PTT setiap OPD nanti. Apabila sudah pasti data PTT, maka akan kita serahkan," ujarnya.

Kepala Satpol PP Benteng, Gunawan R, SE, MM mengatakan, perkiraan PTT di Satpol PP yang akan terdaftar sebanyak 135 orang. Namun teknis besaran klaim jaminan yang diberikan berada pada PT Taspen. Karena setiap OPD memiliki penghitungan berbeda. Untuk Satpol PP Benteng gaji yang diterima PTT sebesar Rp 850 ribu/bulan.(**jee**)

DITO
MASKER: Anggota Satlantas Polres Bengkulu memakaikan masker pada warga yang ditemui kemarin.

Satlantas Polres Bengkulu Sosialisasikan Prokes

BENGKULU - Berbagai macam inovasi dilakukan Satlantas Polres Bengkulu dalam rangka melaksanakan Operasi Lilin Nala 2020 serta sosialisasi protokol kesehatan (Prokes) kepada masyarakat. Selasa (29/12) Satlantas Polres Bengkulu mengelar sosialisasi penerapan Prokes dengan cara unik yakni membagikan makanan kepada masyarakat Kota Bengkulu yang berhak menerima disepanjang kawasan Jalan A. Yani dan Jalan Jendral Soedirman Kota Bengkulu.

"Untuk mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat juga dalam rangka operasi ops lilin nala 2020, kita membagikan makanan berupa nasi kotak kepada masyarakat yang kurang mampu yang berada di jalan. Serta juga membagikan masker dan mengajak masyarakat untuk mencuci tangan agar terhindar dari penyebaran Covid 19. Pembagian nasi ini kita lakukan juga berkat kerja sama masyarakat Kota Bengkulu yang juga peduli sesama," ungkap Kasat Lantas Polres Bengkulu, AKP. Kadek Suwantoro.

Setelah membagikan makanan kepada masyarakat yang berhak menerima, Satlantas Polres Bengkulu lalu melanjutkan kegiatan dengan melakukan bhakti sosial ke salah satu panti asuhan yang berada di jalan Rejamat Kelurahan Jitra Kecamatan Teluk Segara kota Bengkulu dengan memberikan sembako berupa mie instan, beras dan telur.

"Dilanjutkan dengan kegiatan bhakti sosial juga dalam rangka Operasi Lilin Nala 2020 dengan memberikan bantuan berupa sembako kepada adik-adik kita di salah satu panti asuhan dengan tujuan membantu dan meringankan beban adik-adik yang berada di panti. Tak lupa kita juga membagikan masker dan juga terus melakukan sosialisasi dalam penerapan protokol kesehatan," tambahnya.

Ia menambahkan pada Operasi Lilin Nala 2020, Satlantas Polres Bengkulu tetap mengajak, mengimbau dan mengedukasi masyarakat untuk menerapkan slogan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan) untuk mencegah meningkatnya Covid 19 terkhusus di Kota Bengkulu.(**tok**)

Libur Panjang Rawan Penyebaran Covid-19

NUZULUDIN

BENGKULU - Anggota DPRD Kota Bengkulu Nuzuludin mengimbau masyarakat tidak berpergian ke luar kota ketika libur panjang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini guna menghindari lonjakan kasus Covid-19.

Nuzul mengatakan, di saat liburan mobilitas masyarakat cukup padat hingga dikhawatirkan akan timbul klaster baru Covid-19. "Kami imbau masyarakat menahan diri agar tidak berlibur ke luar kota," katanya.

Dari data penyebaran, terjadi tren peningkatan kasus positif Covid-19 sejak dua pekan terakhir. Diharapkan kasus tidak lagi naik karena aktivitas masyarakat pada liburan Natal dan akhir tahun. Ia menegaskan, Tim Covid-19 tetap melakukan pengawasan di semua kegiatan, libur panjang tahun baru 2021 bisa menjadi 'ancaman' dalam penyebaran Covid-19. Kasus Covid-19 selalu mengalami peningkatan cukup signifikan usai liburan panjang.

"Untuk liburan tahun baru, menurut saya, saat ini menjaga diri itu lebih dianjurkan, silaturahmi itu baik. Tetapi perlu menjaga diri jangan sampai kita berbuat sesuatu yang merusak kita," tegasnya.

Dia juga menambahkan, Covid-19 ini pun tak hanya berpotensi ditularkan di tujuan liburan saja, tetapi juga selama di perjalanan. Karena itu, dia berharap, masyarakat lebih menahan diri. Namun, bila seseorang tidak bisa menghindari mudik tersebut, dia pun berharap masyarakat benar-benar menjaga kesehtan dirinya.(**hkm**)

Masyarakat Sehat Ekonomi Bangkit

JADULIWAN

BENGKULU - Sektor usaha, kecil, dan menengah (UKM) di Bengkulu kini harus mampu beradaptasi dan memaksimalkan berbagai cara baru dalam mengakses pendanaan demi kelangsungan usahanya, menyusul masa pandemi Covid-19 yang berlangsung di Indonesia hingga saat ini

Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Bengkulum Jaduliwan mengatakan, peran Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat penting terhadap perekonomian. Saat ini pemerintah pun akan meningkatkan UKM di tengah pandemi Covid-19.

Tujuannya untuk menyelamatkan sekaligus membantu UKM dalam mempertahankan serta mengembangkan usahanya. Salah satunya melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional yang mengarah kepada sektor UKM. "Terutama membangkitkan UKM masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Di tengah pandemi ini, tidak hanya sektor kesehatan yang terdampak, akan tetapi hampir semua sektor termasuk sektor ekonomi, terlebih para pelaku UKM. Berbagai pihak perlu bahu-membahu membantu membangkitkan usaha para pelaku UKM yang memiliki peran penting dalam kebangkitan sektor perekonomian.

Oleh karena itu, Jaduliwan mendorong agar pemerintah dan seluruh stek holder untuk bahu-membahu mempersiapkan solusi extra dan langkah solutif yang bisa ditempuh pemerintah untuk pemulihan ekonomi terutama di sektor UKM. "Dukungan pemerintah bagaimana masyarakat yang takut terhadap dampak Covid saat ini bisa teratasi dengan cepat," Jelasnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat terutama pelaku UKM agar tetap waspada untuk beraktifitas dan berharap kepada pemerintah agar tetap terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bahwa dengan meningkatnya angka Covid cukup memberatkan pelaku UKM. "Mohon dukungan seluruh pihak, karena kegiatan prokes ini tanpa dilakukan secara serentak dan bersamaan dan tidak terputus secara meyeluruh," pungkasnya.(**hkm**)

Percepat Testing Covid-19, Terapkan Rapid Test Antigen

SELUMA - Guna mempercepat upaya tracing dan pemutusan mata rantai Covid-19, Pemkab Seluma telah menggunakan alat rapid test antigen. Pemeriksaan dengan alat rapid tes antigen itu sendiri dilakukan dengan tim medis dari RSUD Tais.

Hal ini setelah Pemkab Seluma mendapatkan bantuan rapid test kit antigen dari pemerintah pusat melalui bantuan Dana Insentif Daerah (DID). Untuk stoknya sendiri, saat ini masih tersedia sekitar 1500 pcs. Adapun peruntukannya sendiri masih belum untuk masyarakat umum namun khusus kontak pasien positif dan juga suspect pasien.

Kepala Dinas Kesehatan Seluma, Rudi Syawaludin SSos mengatakan bahwa memang pihaknya saat ini telah mulai menggunakan rapid tes antigen untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Rapid tes antigen ini digunakan untuk memeriksakan kesehatan apabila ada masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan pasien positif terpapar Covid-19.

Tak hanya itu, rapid test ini juga diperuntukan apabila ada masyarakat yang memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dan memiliki penurunan kesehatan sehingga tergolong dalam kategori suspect. Untuk pemeriksannya sendiri menggunakan rapid tes antigen ini dilakukan oleh tim medis dari RSUD Tais.

"Iya sudah mulai kita gunakan, rapid test antigen ini bisa mendeteksi kasus yang masih infeksius dan akurasinya sekitar 85 persenan, sehingga kita lebih cepat mengambil langkah," sampainya.

Ia menambahkan, dengan hasil pemeriksaan Rapid Tes Antigen yang cepat diketahui, apabila ada yang terindikasi terpapar virus corona dapat langsung diambil langkah selanjutnya. Yakni akan langsung diambil sampel swab tes melalui tes PCR untuk dikirimkan ke Labkesda Provinsi Bengkulu. Kemudian, yang masyarakat yang terindikasi tersebut akan menjalani masa karantina baik isolasi mandiri maupun dirujuk ke RSMY Kota Bengkulu apabila memiliki penyakit penyerta.

"Iya karena hasilnya cepat dan keakuratannya tinggi, jadi bisa cepat mengambil langkah pencegahan penyebaran," lanjutnya. **(cup)**

ARUL
LANTIK: Pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Bengkulu saat dilantik dan diambil sumpah di Ruang Pola Provinsi, Selasa (29/12) siang.

Pelantikan Pejabat, Patuhi Prokes Covid-19

BENGKULU - Dimasa pandemi Covid-19, Pemprov Bengkulu melantik dan pengambilan sumpah janji sebanyak 88 pejabat fungsional di lingkungan Pemprov Bengkulu dengan mematuhi protokol kesehatan (prokes) ketat. Dari 88 yang dilantik, hanya 10 orang yang dihadirkan ke lokasi, sisanya mengikuti secara virtual.

Pelantikan sendiri dilaksanakan di Ruang Pola Pemprov Bengkulu, Selasa (29/12) pukul 13.30 WIB yang dipimpin langsung Asisten III Setda Provinsi, Gotri Suyanto yant mewakili Gubernur Bengkulu. Selain dilakukan secara virtual tersebut, para peserta yang hadir dilokasi juga diwajibkan memakai masker dan diatur jarak tempat duduknya. Di lokasi juga disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer.

Gotri Suyanto berpesan kepada pejabat yang dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. "Saya percaya pejabat yang baru dilantik mampu mengemban amanah yang diberikan," ungkapnya.

Kepala BKD Provinsi Bengkulu, Diah Irianti menambahkan,pejabat yang dilantik sebanyak 32 orang. Rinciannya Auditor 1 orang, Dokter 6 orang, Apoteker 5 orang, Guru 35 orang, Psikolog 3 orang, Fisioterapis 3 orang, Perawat 3 orang, Pranata laboratorium 4 orang, Pranata komputer 5 orang, Pustakawan 4 orang, Pengelola pengadaan barjas 3 orang, Analis kepegawaian 3 orang, Radiografer 3 orang, Pembimbing kesehatan kerja 1 orang. "Kemudian 1 Instruktur , 2 Pengawas ketenagakerjaan, 1 P engawas benih tanaman dan 3 Arsiparis," tutupnya.(**zie**)

RAPID TEST ANTIGEN

- Perjalanan dari dan ke Pulau Jawa yang menggunakna pesawat terbang harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen
- Perjalanan di dalam Pulau Sumatera (antar provinsi/kota/kabupaten) yang menggunakan pesawat terbang harus menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen
- Surat rapid test antigen bisa digunakan paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan.
- Ketentuan membawa hasil rapid test antigen mulai berlaku sejak 19 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021, berdasarkan SE yang dikeluarkan Satgas Covid-19.
- Sedangkan SE Kementerian Perhubungan, yang mengatur hal serupa, baru memberlakukan kewajiban rapid tes antigen untuk pelaku perjalanan pada periode 22 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.

Hasil Rapid Test Antigen Hanya Berlaku Tiga Hari

BENGKULU - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut masa berlaku dokumen hasil *rapid test abtigen* deteksi virus corona (Covid-19) sebagai syarat perjalanan. Dalam hal ini, *rapid test* antigen disebut memiliki hasil yang lebih akurat dari pada tes cepat antibodi dalam mendeteksi infeksi aktif virus corona di dalam tubuh.

Kabid P2P Dinke Provinsi Bengkulu, Lisyenti Bahar mengatakan, protokol kesehatan perjalanan orang selama libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 menyatakan, hasil rapid test antigen hanya berlaku untuk tiga hari. "Sementara itu, masa kedaluwarsa hasil tes usap atau swab dengan metode PCR diturunkan menjadi tujuh hari dari sebelumnya 14 hari," katanya.

Ia menjelaskan, pengetatan peraturan itu dilakukan sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19 di masyarakat. "Untuk perjalanan dari dan ke Pulau Jawa serta di dalam Pulau Sumatera (antar Provinsi/Kab/Kota). Pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif menggunakan rapid test antigen paling lama 3 x 24 jam sebelum keberangkatan sebagai persyaratan perjalanan," jelasnya.

Ketentuan membawa hasil rapid test antigen mulai berlaku sejak 19 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021, berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan Satgas Covid-19. Sedangkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan, yang mengatur hal serupa, baru memberlakukan kewajiban tes antigen untuk pelaku perjalanan pada periode 22 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021," paparnya.

Tes antigen dinilai lebih akurat ketimbang tes antibodi karena mengambil sampel lendir dari dalam hidung dan atau tenggorokan. Sedangkan pada tes antibodi, yang diperiksa adalah antibodi dalam darah. "Keterangan masa berlaku dokumen hasil *rapid test* antigen itu lebih lama dari syarat perjalanan yang telah diatur," katanya. (**hkm**)